PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

SKRIPSI

MUH. AKBAR
105721100521

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. AKBAR
105721100521

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Prongram Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keberhasilan Adalah Kemampuan Untuk Melewat Dan Mengatasi Dari Satu Kegagalan Ke Kegagalan Berikutnya Tampa Kehilangan Semangat Untuk Mencapai Kesuksesan.”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT, Atas Ridho-nya serta karunianya sehingga Skripsi ini tereselesaikan dengan baik,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

PUji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat Terselesaikan Dengan Baik. Alhamdulillahi Rabbil’alamin

Skripsi ini saya persembahan untuk kedua orangtua saya dan saudara saya yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tampa mereka mungkin saya tidak dapat sampai di titik ini.

PESAN DAN KESAN

Selama saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar ini, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga bagi saya. Dibantu dengan dukungan serta bimbingan para dosen yang baik dan juga profesional dalam membantu saya berhasil melalui perkuliahan sampai dengan saat ini.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian	: Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Financial Distress Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
Nama Mahasiswa	: MUH. AKBAR
No.Stambuk/ NIM	: 105721100521
Program Studi	: Manajemen
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 23 April 2025 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 April 2025

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Abdul Muttalib, S.E., M.M.	**Indriana, S.E., M.Ak**
NIDN. 0901125901	**NIDN. 0925129501**

Mengetahui,

Dekan	Ketua Program Studi
Dr. H. Andi Uam'an, S.E., M.Si.	**Nasrullah, SE., MM.**
NBM:651 507	**NBM:1151 132**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: MUH. AKBAR, Nim: 105721100521 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0008/SK-Y/61201/091004/2025 M, Tanggal 24 Syawal 1446 H/ 23 April 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Syawal 1446 H
24 April 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
   (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si. (.....)
   (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (.....)
   (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, S.E., M.M.Ak., CA (.....)
   2. Abdul Muttalib, S.E., M.M. (.....)
   3. Faidul Adziem, S.E., M.Si. (.....)
   4. Sahabuddin N, S.E., M.M. (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. AKBAR

Stambuk : 105721100521

Program Studi : Manajemen

Judul Skripsi : Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan *Financial Distress* Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 April 2025

Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

MUH. AKBAR
NIM: 105721100521

Diketahui Oleh:

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

Ketua Program Studi

Nasrullah, SE., MM.
NBM:1151 132

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUH. AKBAR
NIM	: 105721100521
Program Studi	: Manajemen
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujiui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ***(Nonexclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Financial Distress Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 24 April 2025

Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 5C0E9AMX275531023

MUH. AKBAR
NIM: 105721100521

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PUji syukur kita panjatkaan atas kehadirat Allah SWT untuk segala rahmat dan limpahan karunia-NYA yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita semua.Tidak lupa salam dan shalawat tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan *Financial Distress* Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru" ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis mengucapan terima kasih yang paling istimewa dan terutama penulis sampaikan kepada orang tua penulis, Ibu Saleha, yang selalu memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, serta doa yang tulus. Tak lupa, kepada saudara-saudaraku tercinta yang terus mendukung dan menyemangati hingga akhir studi ini, serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, baik secara materi maupun moral, serta doa restu yang telah diberikan demi kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga segala yang mereka berikan menjadi ibadah dan cahaya penerang di dunia dan akhirat.

Selama proses penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. Abd Rakhim Nanda** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Dr. H. Jam'an, S.E.,M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Nasrullah,S.E.,M.M** Selaku Ketuan Program Studi Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Abdul Muttalib, S.E., M.M.** selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu **Indriana, S.E., M.AK** Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan ilmu dan saran yang sangat berguna serta sabar menghadapi penulis.
6. Bapak **Dr. Dg. Maklassa, S.Pd.,M.M.** selaku Penasehat Akademik.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mentransfer ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Staf Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Barru yang telah memberikan izin meneliti.
10. Terimahkasih Untuk Kedua Orang Tua tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga saya dapat menyesaikan tugas akhir saya
11. Terimahkasih untuk kepada sahabat-sahabat saya telah memberikan motivasi dalam mengerjakan tugas akhir saya.

12. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungan nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan untuk membangun bahan perbaikan penelitian selanjutnya .

Semoga karya sederhana ini dapat memberikanilmu dan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Almamater tercinta, Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. penulis juga mengucapkan permohonan maaf kepada para pembaca maupun pihak terkait jika di dalam skripsi ini ada kata – kata yang menyinggung, semua tidak ada unsur kesengajaan dari penulis, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Billahi FiiSabilil Haq Fastabiqul Khaaiirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2025

Penulis

ABSTRAK

MUH. AKBAR, 2025. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan *Financial Distress* Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abdul Muttalib dan Indriana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Manipulasi Akrual pada Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif dengan sampel laporan keuangan selama 5 (Lima) tahun mulai dari 2019-2023. Jenis data Menggunakan Data Sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Dokumen keuangan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tidak berpengaruh Negarif terhadap Manipulasi Akrual dan *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap Manipulasi Akrual pada Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru.

Kata Kunci: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), *Financial Distress* dan Manipulasi Akrual.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRACT

MUH. AKBAR, 2025. The Effect of Budget Calculation Excess (*SILPA*) and Financial Distress on Accrual Manipulation in Barru Regency Regional Government Financial Reports. Thesis for the Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Abdul Muttalib and Indriana.

This study aims to determine the effect of the Budget Calculation Surplus (SILPA) and to determine the effect of Financial Distress on Accrual Manipulation in the Financial Reports of the Barru Regency Regional Government. The type of research used in this study is quantitative research with a sample of financial reports for 5 (Five) years starting from 2019-2023. Type of data Using Secondary Data. Data collection methods using financial documents and documentation. Data analysis techniques using Multiple Linear Regression Tests.

*The results of the research show that the Budget Calculation Surplus (*SILPA*) has no negative effect on Accrual Manipulation and Financial Distress has a positive effect on Accrual Manipulation in the Financial Reports of the Barru Regency regional government.*

Keywords: Budget Calculation Surplus (*SILPA*), Financial Distress and Accrual Manipulation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN vi
HALAMAN PERNYATAAN vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 9
C. Tujuan penelitian 9
D. Manfaat penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Teori 11
1. Teori Agensi 11
2. Laporan Keuangan 13
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 15
4. Financial Distress 16
5. Manipulasi Akrual Pada Pemerintah Daerah 17
B. Tinjauan Empiris 20
C. Kerangka Konseptual 28
D. Hipotesis 28
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis Penelitian 32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 32
C. Jenis dan Sumber Data 32
D. Sampel Dan Populasi Penelitian 33

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 33
F. Metode Pengumpulan Data 35
G. Metode Analisis Data 36
H. Uji Asumsi Klasik 37
I. PengUjian Hipotesis..... 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Unum Objek Penelitian..... 43
1. Sejarah Perusahaan Badan Keuangan Dan Asset Daerah 43
2. Visi Dan Misi Organisasi 45
3. Truktur Organisasi Dan Job Descriptio..... 46
B. Hasil penelitian 49
C. Uji Asumsi Klasik 52
D. Uji Hipotesis..... 56
a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 56
b. Uji F 57
c. Uji T 58
E. Pembahasan Hasil Penelitian 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 63
A. Kesimpulan..... 63
B. Saran..... 64
DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN..... 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel 35

Tabel 4.1 Statistic Deskriptif 50

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 51

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 53

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas (glejser) 55

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas 56

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 57

Tabel 4.7 Hasil Uji F 58

Tabel 4.8 Hasil Uji T 59

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 28

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 46

Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 54

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran 1 Dokumentasi dokumen laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru tahun 2019-2023 69

Lampiran 2 : Tabulasi Data 77

Lampiran 3 : output hasil penggunakan spss..... 78

Lampiran 4 : Nilai T tabel..... 81

Lampiran 5 : Validasi data dan Abstrak 82

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian 84

Lampiran 7 : Dokumentasi Ketika Melakukan Penelitian 89

Lampiran 8 Surat Plagiasi..... 91

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola sumber daya publik yang memfasilitasi pelaporan keuangan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, pemerintah daerah harus mengelola laporan keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabilitas (Kromen et at., 2023). penerapan konsep *New Public Management* (NPM), yang berfokus pada tingkat kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen yang efektif dan efisien menggunakan penerapan basis akrual serta hadirnya kebijakan diskresi akrual menimbulkan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian salah satunya adalah Manipulasi Akrual (Tampubolon et al. 2023). Pemerintah daerah wajib menerapkan basis akrual dalam pelaporan keuangannya sejak tahun anggaran 2015, sebagai implikasi dari implementasi (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2018) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual yang lebih lengkap dibandingkan basis kas. Bagaimana pun, implikasi yang dapat ditimbukan dari basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah terbukanya peluang untuk melakukan pengelolaan akrual atau Manipulasi Akrual dengan menggunakan *discretionary* (Putri et al., 2023).

Manipulasi Akrual adalah merupakan praktik yang dapat mengubah laporan keuangan pemerintah daerah, yang mempunyai kebebasan untuk melaporkan aset dan kewajibannya serta mencatat pendapatan dan

pengeluaran dengan menggunakan *diskresi akrual* (Cohen et al., 2019). Praktik ini sulit dideteksi dan oleh karena itu telah disalahgunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi akrual. Manipulasi Akrual dapat terjadi pada sektor swasta dan sektor publik. Meski ada tujuan lain seperti di sektor swasta melakukan Manipulasi Akrual untuk meningkatkan keuntungan, nilai perusahaan dan menghindari kesulitan keuangan. Sedangkan di sektor publik salah satunya adalah peningkatkan kinerja keuangan (Gamayuni, 2022). Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan diskresi akrual memberikan kesempatan pada pengelola keuangan pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dengan estimasi atau evaluasi yang tidak obyejtif sehingga mempengaruhi penyesuaian kinerja keuangan seperti evaluasi aset atau penilaian tanggung jawab (Tampubolon et al., 2023).

Manipulasi Akrual dapat mengakibatkan bias pada informasi keuangan yang ditersajikan dalam laporan keuangan, sehingga pengambilan keputusan yang salah dari informasi yang telah dimanipulasi tersebut. Tentu saja keputusan yang buruk tentu tidak diharapkan mengingat laporan keuangan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal sebelum informasi keuangan sampai ke pengguna (*users*). Pemerintah daerah selaku penyusun LKPD, mengakui akrual yang tidak ditercatat dalam transaksi akun-akun anggaran yang menggunakan basis kas. Akun-akun akrual ini sama dengan yang biasa digunakan dalam perusahaan, diakui dan dicatat berdasarkan ketentuan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait. Sebagai alat akuntabilitas untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Putri et al., 2023).

Motivasi manajemen atau penyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk melakukan Manipulasi Akrual, antara lain kondisi keuangan yang tidak sehat (*financial distress*). Menurut Ross dan Westerfield dalam Tubels (2015) *Financial Distress* adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, tujuan utama Pemerintah daerah yang dibentuk adalah untuk menyediakan layanan publik dan sosial serta dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas kehidupan masyarakat, hal ini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah apabila mampu menjaga kesehatan *financial* dan kondisi dimana Pemerintah daerah tidak mengalami deficit selama tiga tahun berturut-turut.

Defisit Pemerintah daerah terjadi ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan. Apabila defisit terjadi maka, salah satu cara untuk menutupi defisit tersebut adalah dengan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. (Shafira and Abdullah, 2022). Ada atau tidaknya Manipulasi Akrual dapat diukur dengan mean absolut. Jika mean absolut sama dengan nol, berarti tidak ada praktik Manipulasi Akrual. Sebaliknya jika *mean absolut* tidak sama dengan nol berarti terjadi praktik Manipulasi Akrual (Gamayuni, 2022). Fenomena Manipulasi Akrual telah banyak ditemukan pada peneliti-penelitian sebelumnya. Seperti Pilcher (2011) yang dikuti oleh Putri et al., (2023) menemukan bahwa Manipulasi Akrual terjadi karena pengaruh faktor oportunistik penyusun yang cenderung ‘menyamarkan’ informasi sebenarnya yang terkandung dalam laporan keuangan dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik atau pengguna. (Putri et al, 2023).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian di atas, sehingga terdapat beberapa keterbaharuan atau perbedaan. Pertama, menggunakan data suatu kabupaten (Kabupaten Barru). Kedua, penelitian ini menggunakan data dari tahun anggaran 2019-2023 dan yang ketiga enggunakan rasio belanja modal untuk mengukur financial distress, dimana pada tahun 2021 SILPA pada tahun tesebut cukup besar.

Financial Distress di sektor publik adalah kurangnya kapasitas pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk operasional, hutang, infrastruktur, dan aktivitas pembangunan lainnya yang bertujuan memenuhi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Jones dan Walker (2007) dan Wulandari dan Arza (2020), *Financial Distress* adalah ketidakmampuan dalam memberikan penyediaan layanan berdasarkan standar layanan yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan manajerial dan sumber daya organisasi untuk memberikan layanan yang berkualitas. Dalam menghadapi *financial distress*, investasi yang digunakan pemerintah daerah merupakan investasi publik yang tercermin dalam belanja modal (Elfiyana and Arza, 2022).

Istilah *Financial Distress* pertama kali muncul di sektor swasta dan didefinisikan sebagai situasi dimana perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan kondisi ini terjadi pada sektor publik seperti pemerintahan, yang dibuktikan oleh penelitian Jones dan Walker (2007) yang dikutip oleh Zakia and Setiawan (2021) yang meneliti tentang *Financial Distress* di New South Wales Negara Bagian Australia. Penelitian tersebut mengidentifkasi faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Distress* di pemerintah daerah sebagai

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan pelayanan yang sesuai standar akibat kurangnya porsi belanja modal yang ditujukan untuk investasi pada pemerintahan. Di Indonesia kondisi *Financial Distress* terbukti dalam laporan evaluasi belanja modal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2013 yang menyatakan penyerapan belanja modal di pemerintah daerah masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah masih belum efektif dan efisien dalam mengoptimalkan belanja modal yang berguna dalam peningkatan pelayanan publik.(Zakia and Setiawan, 2021)

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1, “Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137-153 menyebutkan bahwa, “SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan”.(Kementerian Dalam Negeri, 2006)

Menurut Septariani (2023), SILPA merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pada suatu periode anggaran, dimana terdapat indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengendalikan pengeluarannya, tidak mengalami defisit dan mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan publik. Jika SILPA lebih tinggi dari penerimaan yang berasal dari pendapatan sisa belanja yang belum direalisasi, maka kita

berbicara tentang kinerja keuangan yang buruk. Hal ini menyebabkan terjadinya Manipulasi Akrual untuk menciptakan persepsi bahwa kinerja keuangan baik, namun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pada saat penyusunan APBD, besaran sisa lebih perhitungan anggaran SILPA seharusnya sama dengan nol, hal ini dapat menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan dapat menutupi defisit yang terjadi.

Besaran nilai dari SILPA dapat berarti positif maupun negatif. Indikasi SILPA yang positif adalah dari efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun indicator SILPA yang negatif merupakan sisa dari penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. SILPA yang negatif mungkin disebabkan oleh ketidak cermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran yang buruk sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, SILPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SILPA merupakan dana yang menganggur (*idle fund*), apabila tidak dimanfaatkan secara benar, tidak akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah (Rahmawati and Putri, 2023). Pada Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 sempat Disoroti Anggota DPRD Barru. Tercatat didalam neraca daerah bahwa serapan Anggaran Belanja Daerah masih menyisakan SILPA Rp. 113.828.811.140,35. SILPA tersebut tergolong besar, 11% dari keseluruhan anggaran. Anggota DPRD Rusdi Cara mengatakan SILPA itu sebagian besar terdiri dari proyek-proyek yang tidak bisa diselesaikan dan yang tidak dikerja tahun lalu. Seperti halnya jembatan yang ada di Tanete dan Nepo, itu adalah bantuan keuangan

dari Provinsi termasuk proyek jalan yang tidak bisa diselesaikan. Sementara itu, Bupati Barru Suardi Saleh menyebutkan, SILPA itu karena adanya persoalan proyek yang tidak selesai dan tidak bisa dikerjakan pada tahun lalu sehingga menjadi SILPA.(Soetiono, 2023)

Fenomena manipulasi dapat terjadi Ketika suatu perusahaan mengalami krisis atau *financial distress*, telah diungkap oleh beberapa peneliti. Menurut Yuliana (2011) yang dikutip oleh Shafira dan Abdullah (2022) menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan menghadapi masalah keuangan (*financial distress*), maka dilakukan upaya oleh perusahaan seperti perubahan metode akuntansi, perubahan kebijakan estimasi akuntansi, dan perubahan periode biaya atau pendapatan. Di sektor publik, beberapa peneliti di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Pemda (*municipalities*) yang mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan, maka cenderung melakukan Manipulasi Akrual. Bukti lain menunjukkan bahwa Manipulasi Akrual dapat terjadi apabila adanya alasan politik. Namun sampai saat ini masih terdapat temuan (BPK) terhadap laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut ketua BPK RI Isma Yatun: hasil pemeriksaan (BPK) menunjukan terdapat 9.261 temuan yang mencakup beberapa permasalahan, yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 18,19 triliun.

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya yang besar, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 tahun 2009, tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013, Kabupaten Barru ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus

(KEK). Penetapan Kabupaten Barru sebagai (KEK), merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Barru karena dalam pengembangannya didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten Barru.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat pada tahun 2001, Kabupaten Barru memikul tugas untuk memberikan suatu inovasi di dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintahan pusat bahkan kepada masyarakat Kabupaten Barru sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan pihak luar dalam pengembangan beberapa komoditas pertanian seperti kerjasama pemerintah Kabupaten Barru dengan pemerintah Australia Barat (*perth*) untuk pengembangan komoditas kentang dan provinsi yunan (Republik Rakyar Cina) untuk komoditas kacang tanah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru juga mengalami peningkatan yang positif selama beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2010, Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barru sebesar 6,98%, yang pada tahun 2009 hanya 4,94%. Hal ini disebabkan adanya kemajuan dan peningkatan yang Signifikan dari sektor ekonomi pendukung, khususnya dari sektor primer, yaitu sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Selain sektor tersebut, sektor pendukung sekunder seperti sektor pembangunan dan jasa juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dengan berkembangnya sektor-sektor tersebut, maka semakin terbuka lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja

sehingga pengangguran yang ada di Kabupaten Barru akan semakin berkurang.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan maraknya perekayasaan dan bias yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini beda dengan penelitian sebelumnya karna penelitian ini berfokus pada pemerintahan daerah Kabupaten Barru.

Dari pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui apakah ada atau tidaknya Manipulasi Akrual yang terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pengaruhnya terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk dapat menerapkan pemerintah yang terasparan dan bebas dari Manipulasi Akrual dan dapat bertanggung jawab menuju *good governace*. Dengan demikian akan terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas , tujuan yang ingin di capai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)

berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru

2. Untuk mengetahui apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah

   Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam pengaruh Manipulasi Akrual dalam pencatatan keuangan serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan pencatatan keuangan pemerintah darah di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

   Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku perkuliahan dengan yang ada di dalam dunia kerja. Selain itu, sebagain salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmia dan memperdalam bidang yang diteliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi sektor publik pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi digunakan sebagai *grand theory* yang dapat menghubungkan seluruh variabel dalam penelitian. Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi terjadi pada pemerintah daerah, misalnya pemerintah kabupaten/kota sebagai agen yang menerima dana dari pemerintah pusat bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat, namun agen mempunyai informasi yang lebih dan tidak semuanya dapat diberitahukan kepada masyarakat, sehingga terjadinya asimetri informasi tersebut.(Shafira and Abdullah, 2022)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip oleh Muhammad Rafli dan Fitria (2021) menyatakan bahwa teori keagenan mengacu pada jenis hubungan keagenan di mana satu atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain untuk memberikan layanan demi keuntungan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dalam proses penganggaran dan perubahan anggaran. (Rafli and Fitria, 2021). Asimetri informasi antar pemerintah pusat dan daerah mengacu pada kesenjangan informasi atau pengetahuan di antara kedua tingkat pemerintahan tersebut di dalam suatu negara, yang dipengaruhi oleh

terbatasannya akses terhadap informasi, perbedaan kewenangan, kompleksitas regulasi, kapasitas dan sumber daya, serta ketergantungan keuangan. Adanya asimetri informasi ini menimbulkan terjadinya konflik kepentingan untuk melakukan praktik Manipulasi Akrual dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah untuk mencapai titik optimal yaitu nol (Tampubolon et al, 2023).

Dalam konteks Pemerintah daerah, dalam masalahan keagenan dapat berupa tindakan atau perilaku oportunistik, seperti dengan menganggarkan pendapatan yang terlalu tinggi, memungkinkan alokasi biaya belanja yang lebih besar dan dapat mengakibatkan terjadinya defisit pada akhir tahun. Kepala daerah yang dipilih oleh partai politik cenderung akan bertindak demi kepentingan partai sehingga akan memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih sehat. Masalahan keagenan ini memerlukan proses audit untuk dapat mengurangi perilaku oportunistik yang mungkin bertindak di luar kewajibannya kepada prinsipal. Teori keagenan yang diterapkan pada sektor publik sangat penting diterapkan untuk dapat mengkaji berbagai komitmen terhadap kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan publik dengan permasalah kontraktual, yakni informasi tidak simetris (Shafira and Abdullah, 2022).

Menurut Beck (2018), tindakan Manipulasi Akrual dilakukan oleh pemerintah daerah *(agent)* untuk tujuan dan motif tertentu seperti insentif, pencitraan, dan penghargaan. Insentif yang dimaksud adalah dana insentif daerah dimana pemerintah daerah akan menerima dana insentif jika mencapai kinerja keuangan yang baik, sedangkan pencitraan yang dihasilkan bertujuan untuk membangun citra positif dari publik dan

pemangku kepentingan. Sedangkan motif yang berupa penghargaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat atau badan pengawas keuangan atas pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut Manipulasi Akrual berdampak negatif terhadap laporan keuangan karena disajikan secara tidak akurat dan dapat mempengaruhi stakeholder dalam pengambilan keputusan dan menurunkan kepercayaan dari masyarakat. (Tampubolon et al, 2023).

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi yang disediakan oleh perusahaan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan alokasi modal dengan perusahaan yang bersangkutan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:2), laporan keuangan merupakan salah satu dari proses pelaporan keuangan. Meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya,sebagai laporan arus kas atau laporan arus kas dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan salah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan .

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang mengggambakan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu perusahaan pada periode tertentu dan digunakan *stakeholder* dalam menetapkan keputusan ekonomi. Salah satu ukuran kinerja yang paling sering digunakan *stakeholder* terutama *shareholder* dalam menetapkan keputusan investasi didasarkan atas kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba (Arista and Serly, 2023)

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan denga laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adapun pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan."

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
c. Satuan organisasi dilingkungan puat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pengertian laporan keuangan adalah:

"Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik."

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpukan bahwa laporan

keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan dari laporan keuanga tersebut yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Gunadi, 2017),

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Rahmawati, A. (2015) menjelaskan bahwa SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan (Safitri et al., 2022). SILPA adalah selisih antara *surplus/defisit* dengan pembiayaan netto. SILPA dapat dijadikan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SILPA hanya akan terbentuk jika terdapat *surplus* pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari *defisit* APBD. Karena adanya *surplus* anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SILPA, maka defisit APBD di tahun yang akan dating bisa tertutupi. SILPA ini terdiri dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan kesenjangan antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. (Rani. 2019)

Menurut Usman (2012) yang dikutip oleh Rani (2019) menatakan sisa anggaran berasal dari tiga sumber, yaitu: (1). *Over estimate* pendapatan, terdapat realisasi yang lebih tinggi dari target selama satu

tahun anggaran, (2). Efisiensi belanja tercipta karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja dan (3). SILPA. Hal ini, tersebut diperkuat dengan pendapat Bali (2013) yang menyebutkan bahwa keberadaan SILPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran serta adanya realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih rendah dari pada pagu yang telah dianggarkan. Selain itu beberapa faktor yang terindikasi ikut terlibat dalam pembentukan SILPA adalah dinilai karena ada efisiensi atau penghematan belanja pemerintah atau karena tidak terlaksananya program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Mely Kamelia (2017) menenganai faktor yang menyebabkan SILPA menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif Signifikan dari pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal terhadap SILPA (Rani, 2019).

4. Financial Distress

Financial Distress (FD) terjadi ketika Pemda tidak dapat mempertahankan tingkat pelayanan yang sudah ada sebelumnya, keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk layanan *public* ketidak sesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan pengeluaran yang dibutuhkahkan untuk pelayanan (Haura et al., 2024).

Menurut Trussel dan Patrick (2009) yang dikutip oleh Haura et al. (2024) *Financial Distress* (FD) ialah ketidak seimbangan pendapatan dan pengeluaran dan mengalami defisit selama tiga tahun berturut-turut dengan kumulatif lebih dari 5%. Menurut Farida (2019) *Financial Distress* merupakan kondisi yang mengarah pada kemampuan perusahaan

mendapatkan laba (Dandi and Suhaili, 2023).

Beberapa faktor yang mempengaruhi *Financial Distress* Pemerintah Daerah seperti menurut Rinaldi (2022) bahwa kemandirian keuangan daerah menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menemukan sumber keuangannya, mengelola dan mengendalikan keuangan sendiri. Besarnya tingkat kemandirian keuangan juga menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah dalam merencanakan belanja modal untuk meningkatkan pelayanan prima. Selanjutnya menurut Pranoto, Hasthoro & Nurwiyanta (2022), derajat desentralisasi fiskal juga berpengaruh negatif terhadap financial distresspada Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal untuk pelayanan public, kondisi ini juga didukung semakin lama berdirinya satu pemerintahan daerah maka diharapkan pemerintah daerah tesebut telah mampu mengatasi segala hambatannya dengan pengalaman financial yang didapatnya (Dewata et al., 2023).

Untuk konteks Indonesia, *Financial Distress* (FD) pada pemerintah kabupaten/kota diukur dengan data defisit anggaran selama tiga tahun berturut-turut, dimana defisit terjadi apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban dalam laporam operasional (LO) Pemda (Haura et al., 2024).

5. Manipulasi Akrual Pada Pemerintah Daerah

Menurut Stolowy & Breton (2004) yang dikutip oleh Putri et al. 2023 mengartikan manipulasi sebagai penggunaan kebijakan manajemen untuk

membuat pilihan akuntansi dan merancang transaksi yang dapat mempengaruhi transfer kekayaan antara perusahaan-masyarakat (kos politik), kreditur (biaya modal), atau pun rencana skema kompensasi. Artinya, Manipulasi Akrual adalah kebijakan yang dipilih oleh manajemen untuk menghasilkan angka-angka dalam LKPD sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Fenomena Manipulasi Akrual lazim terjadi pada perusahaan. Untuk sektor publik atau pemerintahan, fenomena ini mulai muncul setelah adanya penerapan akuntansi berbasis akrual. Di Indonesia pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Namun, di seluruh dunia, *New Zealand* adalah negara pertama yang menggunakan Basis akrual pada awal tahun 1990-an, dan selanjutnya sebagian negara lain juga mengaplikasikan Basis akrual baik untuk penyusunan laporan keuangan dan juga untuk penganggaran (contohnya pada Australia, Selandia Baru, dan Inggris) (Shafira and Abdullah, 2022).

Akrual diterapkan pada berbagai bagian baik *asset*, pendapatan, beban, kewajiban dan lain-lainn, untuk mengetahui ukuran akrual yang diimplementasikan oleh manajemen Pemerintah daerah dalam mengelolaan dan pelaporan keuangan. Ukuran akrual adalah tingkatan penerapan akrual yang dijalankan oleh manajemen Pemda terhadap terlaksanakannya diskresi akrual. Jika *diskresi akrual* diterapkan, maka ukuran akrual pada pemerintah darah tentunya menjadi berbeda-beda.

Kewenangan dan kebijakan manajemen pemerintah daerah yang bertujuan mengimplementasikan Basis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat disebut sebagai *diskresi*

akrual. Rohman (2016) menyatakan bahwa, "*diskresi akrual* atau kebijakan yang dapat memanipulasi angka-angka akuntansi yang dianggap memiliki keterkaitan terpola dengan aspek-aspek lain pada organisasi (Pemerintah daerah) seperti total akrual, piutang, pendapatan, *plant property and equipment* (PPE) tetapi, terkadang ada beberapa sebagian jumlah nilai Manipulasi Akrual yang tidak tepat dalam keterkaitan pola tersebut.

Nilai yang tidak tepat disebut dengan diskresi akrual abnormal, yang terkadang diaplikasikan sebagai proksi bahwa diskresi akrual telah "dimanipulasi." Manipulasi Akrual *diskresioner* memiliki tujuan akhir, tentu saja dengan memanipulasi angka laba atau manipulasi laba akrual. Manajemen Pemda melaksanakan "manipulasi" pendapatan (*surplus/defisit*) pendapatan tahun berjalan dikarenakan berbagai unsur motif tertentu (Shafira and Abdullah, 2022).

Menurut Pellicer et al., (2016) penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah menciptakan diskresi akrual yang memotivasi melakukan praktik manajemen surplus/defisit karena adanya insentif/motif bagi manajemen sektor publik untuk mencapai target berada di titik impas. Artinya pemerintah berusaha mencapai atau berusaha untuk menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran guna menghindari terjadinya defisit anggaran. Untuk mengetahui tingkat Manipulasi Akrual maka dapat dilakukan perhitungan menggunakan rumus modifikasi Jones. Berikut formula proses penurunan persamaannya (Tampubolon et al., 2023):

TA_{it} = COFO−Dy

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \propto\left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_1\left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}}\right) + \beta_2\left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right)$$

$$NDA_{it} = \propto\left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_1\left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}}\right) + \beta_2\left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right)$$

Keterangan:

- TAit = Total akrual pemerintah daerah pada waktu t
- Dy_{it} = Surplus/defisit untuk pemerintah daerah i pada tahun t
- $COFO_{it}$ = Arus kas bersih dari aktivitas operasi pemerintah daerah i pada tahun t
- Ait−1 = Total aset tahun sebelumnya
- ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan dari pemerintah daerah i pada tahun t
- ΔREC_{it}= Piutang usaha pemerintah daerah i pada tahun t
- PPE_{it} = Total aset tetap pemerintah daerah i pada tahun t

Diskresi akrual (DA) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$DA_{it}=TA_{it} - NDA_{it}$$

Keterangan:

- DA_{it}= Diskresi akrual
- TAit: Total akrual pemerintah daerah pada waktu t
- NDA_{it}= Estimasi non diskresi akrual

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan salah satu bagian dari indikator dalam persyaratan karya tulis ilmiah dimana didalam tinjauan empiris menjelaskn tentang hasil penulisan karya tulis ilmiah terdahulu, sebagai salah satu untuk

penarikan interprestasi dari karya ilmiah dan berfungsi sebagai landasan dalam memperoleh hasil penulisan karya tulis ilmiah yang relevan dan objektif maka dari itu tinjauan empiris antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Illahi, et al., (2021)	Pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja dalam memprediksi status *Financial Distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota Di provinsi sumatera barat	Independent: Kemandiriankeuangan, derajat desentralisasi, keselarasan belanja. Dependen: Financial distress	Regresi logistik biner	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)Secara Parsial Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh dalam memprediksi status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat (2) Secara Parsial Derajat Desentralisasi tidak berpengaruh dalam memprediksi status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat (3) Secara Parsial Keselarasan belanja berpengaruh dalam memprediksi status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi SumateraBarat (4) Secara Simultan Kemandirian keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan

					Belanja berpengaruh dalam memprediksi status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat (Illahi, et al., 2021)
2	Zakia dan Setiawan (2021)	Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019)	Independent: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas, Rasio Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi, Kompleksitas Pemda, Luas Wilayah, Opini Audit Dependen: Financial distress	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)Nilai Signifikansi dari rasio efektivitas mengambarkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh tidak Signifikan terhadap *Financial Distress* dan nilai koefisien dari rasio efektivitas yang negative (2) Nilai Signifikansi rasio efisiensi menggambarkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh tidak Signifikan terhadap financial distress Nilai Signifikansi dari rasiosolvabilitas Menunjukkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh tidak Signifikan terhadap financia ldistress (3) Nilai Signifikansi dari rasio pertumbuhan rasio pertumbuhan berpengaruh Signifikan terhadap financial distress. (4) Nilai

					Signifikansi dari derajat desent ralisasi derjat desentralisasi berpengaruh Signifikan terhadap *Financial Distress* dan nilai koefisien regresi derajat desentralisasi negatif (5) Nilai Signifikansi dari kompleksitas keuangan pemerintah daerah kompleksitas keuangan pemerintah daerah berpengaruh Signifikan terhadap financial distress. Nilai koefisien regresi kompleksitas keuangan pemerintah daerah negative (Zakia and Setiawan, 2021)
3	Elfiyana dan Fefri Indra Arza, (2022)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi *Financial Distress* di Indonesia	Independent: Kemandirian keuangan Derajat desentralisasi, Rasio efisiensi, Rasio pertumbuha, Rasio efektivitas Dependen: *Financial distress*	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh Signifikan positif terhadap financial distress, Derajat desentralisasi berpengaruh Signifikan negatif terhadap financial distress. Jumlah penduduk berpengaruh Signifikan negatif terhadap financial distress, Rasio efisiensi berpengaruh

					secara Signifikan dan positif terhadap financial distress. Rasio pertumbuhan berpengaruh tidak Signifikan positif terhadap financial distress. Rasio efektivitas berpengaruh Signifikan terhadap financial distress (Elfiyana and Arza, 2022)
4	Handayani, et al., (2022)	Determinan Manipulasi Akrual dalam pelaporan Keuangan pemerintah daerah	Independent: *Government size*, Kapasitas fiscal, Fiscal distress, Legislature size Dependen: Manipulasi akrua	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: *government size* dan *fiscal distress* berpengaruh *negatif* dan *legislature size* berpengaruh positif terhadap Manipulasi Akrual dalam pelaporan keuangan Pemda, sedangkan kapasitas fiskal tidak berpengaruh (Handayani, et al., 2022)
5	Shafira, dan Abdullah, (2022)	Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dan *Financial Distress* terhadap Manipulasi Akrual pada pemerintah daerah di indonesia	Independent: SILPA, Financial Distress Dependen: Manipulasi Akrual	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: SILPA berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, *Financial Distress* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada pemerintah daerah di Indonesia (Shafira and Abdullah. 2022)
6	Wulandari dan	Pengaruh	Independent:	Regresi	Hasil penelitian ini

	Fauzihardani (2022)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PenyerapanAnggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Fiscal Stress*, Pendapatan Asli Daerah. Dependen: Penyerapan Anggaran	linear berganda	menunjukkan: (1)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh Signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. (2) Fiscal Stress tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. (3) Pendapatan Asli Daerah bepengaruh Signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. (Wulandari and Fauzihardani, 2022)
7	Ayuni, et al., (2023)	Analisa Pengaruh SILPA Dan Varians Anggaran Belanja Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Selatan	Independent: SILPA, Varians Anggaran Belanja Dependen: Perubahan Anggaran Belanja	Regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: SILPA positif dan Signifikan mempengaruhi terjadinya perubahan anggaran belanja. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat SILPA, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perubahan anggaran belanja daerah, Varians Anggaran Belanja berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap perubahan anggaran belanja. Pengaruh yang

					Signifikan dari varians anggaran belanja dapat menjadi acaun untuk perubahan anggaran belanja periode sekarang. (Ayuni, et al., 2023)
8	Dellia, (2023)	Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), *Financial Distress*, Government Size, Dan Kualitas Audit Terhadap Manipulasi Akrual Pada Pemerintah Daerahrndi Indonesia.	Independent: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Financial Distress*, Government Size, Dan Kualitas Audit. Dependen: Manipulasi Akrual	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) SILPA tidak memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual, (2) *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual, (3) government size memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual, (4) kualitas audit memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual. (Dellia, 2023)
9	Haura, et al., (2024)	Pengaruh SILPA terhadap Belanja Barang dan Jasa dan Efek Moderasi *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah	Independent: perubahan anggaran SILPA, Dependen: Perubahan Anggaran BBJ Moderasi: *Financial Distress*	Regresi linier berganda dan Moderated Analysis Regression (MRA)	Hasil penelitian ini menunjukkan: perubahan Anggaran SILPA dan *Financial Distress* mempengaruhi perubahan anggaran barang dan jasa. Sedangkan hasil dengan menggunakan MRA menunjukkan bahwa *Financial Distress* memoderasi pengaruh perubahan anggaran SILPA terhadap perubahan anggaran barang

					dan jasa. (Haura et al., 2024)
10	Tampubolon, et al., (2023)	Pengaruh *Government Size, Fiscal Distress,* dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Manipulasi Akrual	Independent: *Government Size, Fiscal Distress*, SILPA Dependen: Manipulasi Akrual	Regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) *Government size* tidak berpengaruh Signifikan terhadap Manipulasi Akrual. Artinya besar atau kecilnya ukuran pemerintahan, tidak mempengaruhi terjadinya Manipulasi Akrual. (2) *fiscal distress* berpengaruh secara positif Signifikan terhadap Manipulasi Akrual. Mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada variabel *fiscal distress* maka pemerintah mengalami kesulitan keuangan atau defisit menimbulkan peningkatan Manipulasi Akrual. (3) SILPA berpengaruh secara negatif Signifikan terhadap Manipulasi Akrual yang menimbulkan perbandingan terbalik artinya jika SILPA tinggi maka Manipulasi Akrual akan rendah. (Tampubolon et al., 2023)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Kerangka Konseptual

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara Variabel-variabel penelitian yaitu antara variable independent dan variable dependen. (Sugiyono, 2017).

kerangka konseptual adalah suatu model konseptual yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka ini didasarkan pada teori-teori yang ada serta hasil penelitian terdahulu, yang kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah model yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian. Karena menjadi dasar. kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Adapun Kerangka konseptual yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

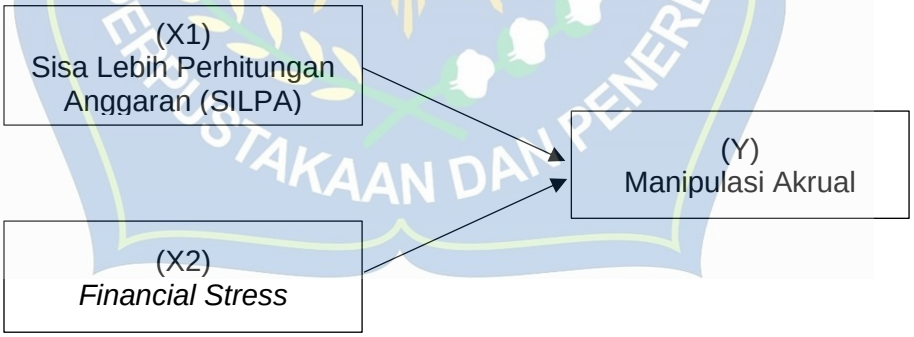

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan semetara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga pengaruh yang positif Signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

1. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap Manipulasi Akrual

SILPA adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) periode anggaran. Segala aktivitas transaksi keuangan yang termasuk SILPA tahun sebelumnya baik bersumber dari penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa-sisa dana kegiatan yang sudah terealisasi. Hasil analisis yang dilakukan Shafira, (2015), Octariyani et al., (2022), Gamayuni et al., (2022), bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap Manipulasi Akrual yang mengindikasi jika anggaran belanja lebih besar dari penerimaan daerah, sehingga pemerintah daerah menggunakan kebijakan diskresi akrual untuk menyamarkan laporan keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan analisis yang dilakukan Prasetyo & Rusdi (2021) bahwa SILPA berpengaruh negatif terhadap Manipulasi Akrual karena peningkatan pendapatan yang terbentuk dari sisa anggaran belanja pemerintah daerah yang tidak terealisasi disebut kinerja keuangan yang buruk. Dimana terdapat sisa anggaran belanja pemerintah tidak terealisasi yang seharusnya nol artinya dalam pengelolaan anggaran dapat menutupi defisit yang terjadi pada periode tersebut.

Sejalan dengan temuan Handayani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ketika SILPA relatif naik yang bersumber dari pendapatan terbentuk dari sisa belanja yang belum terealisasi, maka Manipulasi Akrual diprediksi

akan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya menurunkan SILPA mendekati nol untuk mencerminkan kinerja laporan keuangan yang baik dengan kebijakan diskresi akrual yang abnormal atau Manipulasi Akrual, begitu juga dengan sebaliknya (Tampubolon et al., 2023). Dengan demikian pengaruh SILPA dan Manipulasi Akrual dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

H1: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) memikili pengaruh negatif terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru.

2. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Manipulasi Akrual

Pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menyediakan layanan publik dan sosial serta dapat berkontribusi pada kualitas kehidupan masyarakat yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah jika mampu menjaga kesehatan *financial* dan dimana suatu kondisi pemerintah daerah tidak mengalami defisit berturut- turut selama tiga tahun. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan kewenangan untuk mengelola keuangan agar Pemerintah daerah terlihat lebih baik dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Otoritas manajemen pemerintah daerah bertujuan mengimplementasikan basis akrual pada pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah disebut sebagai diskresi akrual.

Financial Distress terdapat keterkaitan dengan akrual diskresioner, dimana ukuran kesulitan keuangan yang meningkat cenderung berusaha akan menjadikan manajemen untuk melakukan Manipulasi Akrual supaya dapat menurunkan ataupun meningkatkan pendapatan dan dapat

mengumumkannya kepada publik dengan laporan keuangan yang sudah terlihat lebih baik, dan sebaliknya. Shafira dan Abdullah (2022) mengemukakan *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap Manipulasi Akrual. Dengan demikian pengaruh *Financial Distress* dan Manipulasi Akrual dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

H2: *Financial Distress* memiliki pengaruh positif terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018) adalah jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrument penelitian dengan tujuan menggambarkan dan mengUji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data penelitian dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah daerah Kabupaten Barru dan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kabupaten Barru.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024–Februari 2025

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah Data sekunder merupakan data numerik yang didapatkan secara tidak langsung atau diperoleh dari media perantara atau pihak lain Sugiyono (2018). Data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah, yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah daerah.

2. Sumber Data

Sumber data sekunder pada penelitian ini diproleh dari. Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menggunakan seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Operasional, Arus Kas, dan Neraca pada Pemerintah Daerah periode 2019-2023 yang sudah di audit oleh BPK RI. Adapun jumlah amatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 5 tahun, sehingga sampel yang diteliti berupa data Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru.

D. Sampel Dan Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Barru. Penulis dalam penelitian ini, mengambil seluruh populasi dikarenakan tersedianya seluruh data. Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Keuangan yang bersangkutan dalam variable dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) selama 5 tahun, dari tahun 2019 sampai 2023.

E. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel merupakan metode pengaplikasian konsep sebuah variabel sehingga dapat diukur variabelnya, yang dirumuskan berdasarkan perspektif yang dimiliki oleh konsep tersebut dan selanjutnya dapat dikategorikan pada komponen-komponen yang dapat diukur (Bougie 2016). Menurut Sugiyono (2017) Terdapat dua variable penelitian, yaitu variable terikat (*dependent variable*) dan variable bebas (*independent variable*). Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas (*independent variable*), Variabel ini sering kali menjadi fokus utama penelitian karena

menunjukkan hasil atau *outcome* yang diteliti. sedangkan Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Penentuan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian yang bertujuan untuk operasional variabel, serta penentuan skala indikator untuk mengukur dari masing-masing variabel. Definisi dan pengukuran Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manipulasi Akrual

   Manipulasi Akrual merupakan tindakan penyesuaian atau perubahan dalam laporan keuangan dengan tujuan memengaruhi evaluasi kinerja keuangan, kualitas pelaporan keuangan, dan pengelolaan *surplus* atau *defisit*, untuk pengukuran Manipulasi Akrual (Bisogno & Donatella, 2021).

2. *Financial Distress*

   Financial Distress ini dapat terjadi ketika ketidakmampuan Pemda dalam memenuhi kebutuhan operasional, membayar utang, dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu tahun lebih secara berturut-turut (Shafira and Abdullah, 2022).

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

   SILPA merupakan sisa lebih dari perolehan penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang sudah terealisasi. Pengukuran variabel di lihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel

Variabel	Kode	Indikator/Pengukuran	Sumber
Manipulasi Akrual	Y_MA	$DA_{it}=TA_{it} - NDA_{it}$	Metode Model Jones modifikasi (Jones, 2010)
Finnciall Distress	X1_FD	$FD=\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$	(Zakia and Setiawan, 2021)
SILPA	X2_SA	$SILPA=\frac{\text{Realisasi SILPA}}{\text{total pendapatan}}$	(Wulandari and Fauzihardani, 2022)

F. Metode Pengumpulan Data

Proses Pengumpulan data yang diperlukan untuk pembahasan ini sebagai berikut:

1. Dokumen keuangan

Dokumen keuangan adalah catatan formal yang berisi informasi terkait transaksi keuangan dan posisi keuangan suatu entitas. Dokumen ini berfungsi sebagai alat untuk memantau, melaporkan, dan mengevaluasi kesehatan keuangan serta hasil operasional. Dokumen keuangan juga digunakan oleh auditor, manajer, investor, dan pihak-pihak lain untuk menilai kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan serta peraturan yang berlaku. Dokumen keuangan yang diambil berupa Data Sekunder, Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen audit, dan sumber lainnya yang relevan yang sudah di periksa oleh BPK. Data ini mencakup informasi tentang SILPA, *financial distress*, dan laporan keuangan yang relevan.

2. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data dari sumber data dokumen yang berasal dari kantor keuangan daerah

Kabupaten Barru. Metode Dokumentasi ini mencari data berupa pengambilan Gambar saat Pengambilan Data Laporan keuangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di Kantor Keuangan daerah Kabupaten Barru.

G. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan mengatur data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Ini melibatkan penggunaan statistik deskriptif seperti mean, median, dan mode untuk menggambarkan karakteristik dasar dari dataset yang ada menurut Sekaran & Bougie (2016). Pada penilitian ini Peneliti menggunakan alat staristik SPSS untuk memudahkan menganalisis data.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan teknik analisa data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan yang diketahui, regresi linear berganda yang memiliki fungsi dan bertujuan mengUji pengaruh dari 2 (dua) variabel yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu SILPA (X1), dan *Financial Distress* (X2), sedangkan variabel dependennya yaitu Manipulasi Akrual (Y). Penggunaan analisis ini untuk menjalankan perkiraan dan ingin melihat perubahan nilai variabel dependen ketika nilai variabel independent ditingkatkan atau diturunkan nilainya (Sugiyono, 2017).

Metode analisis ini digunakan untuk mengUji dan mengetahui "pengaruh atau hubungan antara variabel bebas yaitu: SILPA (X1) dan *Financial Distress* (X2) terhadap variabel terikat yaitu Manipulasi Akrual (Y)". Persamaan regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + e,$$

Keterangan:

Y : Manipulasi Akrual

α : Konstanta

b_1b_2 : *Koefisien Regresi*

X1 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

X2 : *Financial Distress.*

e : *Error Terms* atau *Residual.*

H. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengUjian yang dilakukan untuk memastikan bahwa residual mengikuti pola distribusi normal. Hal ini perlu dilakukan agar memperkuat keyakinan bahwa hasil hipotesis dalam penelitian ini benar-benar akurat dan valid. Dalam pengUjian normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Kolomogorov-Smirnov*. Dari pengUjian ini maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Nilai yang dijadikan acuan dalam pengUjian normalitas merupakan nilai Assymp.Sig (2-tailed) pada hasil output SPSS. Jika nilai dalam tersebut lebih besar dari alpha atau (Sig) > 0.05 maka disimpulkan Ho ditolak dan

Ha diterima dengan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selain menggunakan Uji Kolomogorov Smirnov, Uji normalitas juga dapat dibuktikan dengan melihat Normal *Probability Plot*. Dalam melihat grafik tersebut, maka dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Jika titik-titik pada grafik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau jika gambar histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka dikatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika titik-titik pada grafik menyebar jauh dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau gambar histogramnya tidak menunjukkan distribusi normal, maka dikatakan bahwa model regresi telah melanggar asumsi moralitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas, seperti halnya Uji normalitas, merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heterokdastisitas atau tidak hanya dengan melihat pada *Scatter Plot* dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Cara ini menjadi masalah fatal yaitu heteroskedastisitas atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja, kekuragannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Banyak metode statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, seperti misalnya Uji *White*, Uji *Glejser*, atau melihat grafik *Scatterplot*. Jika pola titik-titik menyebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Model ini akan memperkenalkan salah satu Uji heteroskedastisitas yang mudah dan dapat diaplikasikan di SPSS.

3. Uji Multikolinearitas

PengUjian ini mengUji ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel bebas penelitian disebut Uji multikolinearitas. PengUjian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *variance inflation factor* (VIF) pada masing-masing variabel bebasnya, dengan Cara menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *telerence* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerence* < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka terdapat multikolonearitas, jika nilai *tolerence* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolonearitas.

I. PengUjian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Berdasarkan hasil regresi berganda tersebut, maka selanjutnya dapat dianalisis koefisien determinasinya (R2) yaitu koefisien determinasi parsial untuk mengukur secara terpisah dampak variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y).

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi kemudian dikalikan 100%. Persentasi tersebut menunjukan besarnya pengaruh variable independen terhadap variable dependen, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Besarnya koefisien dari 0 sampai 1, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 maka besarnya koefisien

determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas.

2. Uji F

Uji F atau Uji *koefisien regresi* secara bersama-sama digunakan untuk mengUji apakah model regresi yang digunakan secara keseluruhan memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, Uji F digunakan untuk menentukan apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan *Financial Distress* secara bersama-sama memiliki pengaruh Signifikan terhadap Manipulasi Akrual.

Menurut Sujarweni (2019), Uji F adalah pengUjian Signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F berfungsi untuk mengUji hipotesis nol (H_0) bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol (tidak ada pengaruh Signifikan) versus hipotesis alternatif (H_a) bahwa setidaknya ada satu koefisien regresi yang berbeda dari nol (ada pengaruh Signifikan).

Uji F digunakan untuk mengUji Signifikansi dari model regresi secara keseluruhan. Uji ini mengevaluasi apakah variabel independen dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Apabila hasil Uji F menunjukkan bahwa model regresi Signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa ada setidaknya satu variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilihat dengan nilai F hitung dan juga membandingkan hasil dari *probability value*. Jika F-hitung> F-tabel dan *probability value* dalam kolom Sig < 0,05 maka dapat disimpulkan (H_0) ditolak dan (H_a) diterima. PengUjian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika F_hitung > F_tabel atau p-value ≤ α (0,05): Hipotesis nol (H_0) ditolak yang berarti model regresi secara keseluruhan Signifikan dan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika F_hitung ≤ F_tabel atau p-value > α (0,05): Hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak yang berarti model regresi tidak Signifikan dan variabel independen tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji T

Uji t merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengUji hipotesis individu dari variabel independen dalam model regresi linier. Uji ini membantu menentukan apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen berbeda secara Signifikan dari nol, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Menurut Imam (Ghozali, 2018) Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variable bebas dalam model regresi berpengaruh secara individual terhadap variable terikat dengan dasar pengambilan keputusan bahwa: Jika nilai Sig < 0,05 atau t-hitung > t-tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai Sig > 0,05 atau t-hitung < t-tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. PengUjian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika t_hitung > t_tabel atau p-value ≤ α (0,05): Hipotesis nol (H_0) ditolak yang berarti variabel independen tersebut memiliki pengaruh Signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika t_hitung ≤ t_tabel atau p-value > α (0,05): Hipotesis nol (H_0) diterima yang berarti variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap variabel dependen.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Unum Objek Penelitian

1. Sejarah Perusahaan Badan Keuangan Dan Asset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.

Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru 24 tahun 2022 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 24) Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barru melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melakasanakan urusan tugas pembantuan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BPKAD 2021- 2026 adalah Rencana Strategi yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Barru yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Kabupaten Barru serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen public yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi Dan Misi Bupati Barru Periode 2021 – 2026.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Barru merupakan dokumen yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Renstra BPKAD 2021-2026 berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan Kabupaten Barru serta berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra BPKAD dilakukan dengan melakukan orientasi mengenai Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. Dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD adalah RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Barru maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD.

2. Visi Dan Misi Organisasi

a. Visi

Meningkatkan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan

b. misi

- Meningkatkan tertib Pengelolaan Aset Daerah Menurut Pedoman Pengelolaan Daerah.
- Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerha yang tertib, akuntabel dan transparan

3. Truktur Organisasi Dan Job Descriptio

a. struktur organisasi

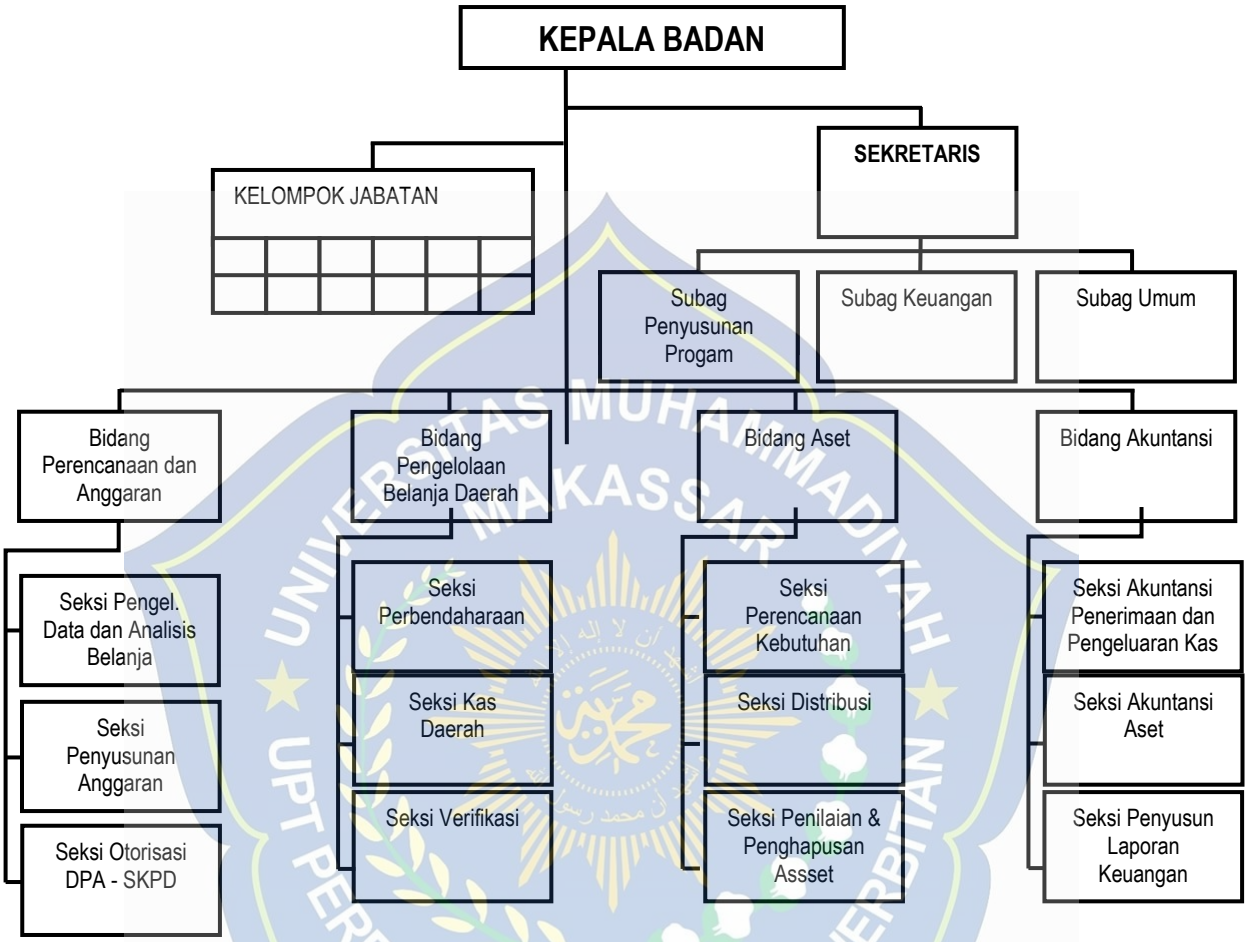

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

b. job description

1. Sekretariat / Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar dinas/perangkat daerah lainnya.Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

a) Pengkoordinasian Penyusunan program;

b) Pengelolaan Keuangan;

c) Pelayanan Administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2. Bidang Perencanaan dan Anggaran

Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perencanaan dan anggaran.Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan anggaran;

b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perencanaan anggaran;

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan anggaran; dan

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bidang Pengelola Belanja Daerah

Bidang Pengelola Belanja Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun

perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang pengelolaan belanja daerah.Bidang Pengelola Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan belanja daerah;
b) Penyelengaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan belanja daerah;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan belanja daerah; dan
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

4. Bidang Asset

Bidang Asset mempunyai tugas membantu kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Asset.Bidang Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarkan fungsi;

a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang asset
b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang asset;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang asset; dan
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala Badan dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Akuntansi.Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarkan fungsi:

a) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi;
b) Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang akuntansi;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi; dan
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

B. Hasil penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah adalah data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lain sebelumnya, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk mendukung variabel penelitian ini.

1. Statistic Deskriptif

Pengukuran statistic deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti rata-rata (*mean*), tertinggi (*max*), terendah (*min*), dan standar daviasi dari masing-masing variabel yaitu Manipulasi Akrual (Y), SILPA (X1), Dan *Financial Distress* (X2). Mengenai hasil Uji Statistic Deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manipulasi Akrual	5	.050040	.098133	.06681480	.018509974
SILPA	5	.078007	.127467	.10495563	.022034430
Financial Distress	5	.126214	.220499	.16213342	.036370061
Valid N (listwise)	5				

Sumber: data diolah di spss v27,2025

Berdasarkanhasil Tabel 4.1 Uji Statistic Deskriptif diatas, peneliti menjelaskan data yang di peroleh sebagai berikut:

a. Manipulasi Akrual (Y), yaitu dengan nilai minimum tercatat 0.050040, nilai maksimum 0.098133 dan rata-rata (*mean*) sebesar 0.06681480 degan standar deviation sebesar 0.018509974, menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat Manipulasi Akrual yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. SILPA (X1) yaitu dengan nilai minimum adalah 0,78007, nilai maksimum 0,127467, dan rata-rata 0.10495563 dengan standar deviation sebesar 0.022034430. Hal ini menunjukkan bahwa SILPA pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru cenderung tinggi, yang mungkin berkontribusi pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

c. *Financial Distress* (X2) yaitu dengan nilai minimum adalah 0.126214, nilai maksimum 0.220499, dan rata-rata 0.16213342. Dengan standar deviasi data sebesar 0.036370061. Nilai ini menunjukkan adanya potensi risiko finansial yang dihadapi oleh pemerintah

daerah, yang dapat berdampak pada keputusan akrual dalam laporan keuangan.

Secara keseluruhan, analisis deskriptif ini memberikan gambaran awal tentang variabel-variabel yang dianalisis dan pentingnya mempertimbangkan interaksi antara SILPA dan *Financial Distress* dalam mempengaruhi Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.012		-.415	.718
	SILPA	-.073	.071	-.087	-1.027	.412
	Financial Distress	.490	.043	.962	11.355	.008

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

Sumber: data diolah di spss v27,2025

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y=-0.005+-0.073x_1+0.490x_2+e,$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

α : -0.005 merupakan nilai konstanta, jika nilai x1 dan x2 dianggap 0 maka dari itu nilai dari Manipulasi Akrual adalah sebesar 0.005

b_1 : -0.073 artinya variabel SILPA berpengaruh Negatif terhadap variabel Manipulasi Akrual dan apabila variabel SILPA meningkat satu kesatuan,

maka Manipulasi Akrual akan menurun sebesar -0.244.

b_1 : 0.490 artinya variabel *Financial Distress* berpengaruh Positif terhadap variabel Manipulasi Akrual dan apabila variabel financia distress meningkat satu kesatuan. Maka Manipulasi Akrual akan meningkat sebesar 0.490

C. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan Uji noemalitas untuk mengUji apakah regresi variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Nilai Signifikansi yang diperoleh berdasarkan Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov di lihat pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih sebesar dari 0.05, sehingga dinyatakan bahwa data pada penelitian berdistribusi dengan normal. Hasil Uji normalitas disajikan pada tabel 4.3. Berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			5
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.00210238
Most Extreme Differences	Absolute		.172
	Positive		.129
	Negative		-.172
Test Statistic			.172
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.921
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.914
		Upper Bound	.927

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true Significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: data diolah di spss v27,2025

Dari tabel 4.3 di atas. hasil menunjukkan nilai Signifikansi sebesar 0,200 > 0,05. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada alasan untuk menolak H0 yang menyatakan bahwa data residual terdistribusi normal. Dengan kata lain, distribusi residual memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk analisis regresi. Normalitas residual penting untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh, termasuk pengaruh SILPA dan *Financial Distress* terhadap Manipulasi Akrual, dapat diandalkan dan valid

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas di gunakan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model

regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini :

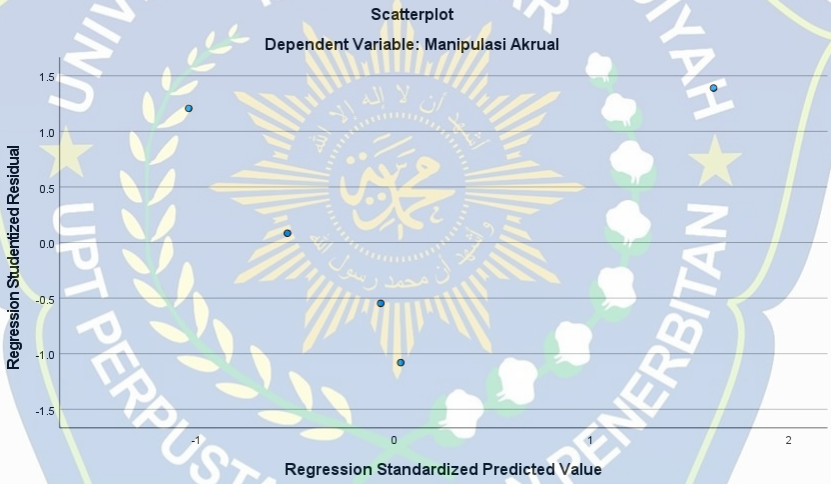

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: data diolah di spss v27,2025

Berdasarkan gambar di atas hasil Uji heterokedastisitas, diketahui bahwa ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Dan untuk memastikan lebih lanjur peneliti melakukan Uji -glejser dapat dilihat pada nilai Sig apabila Sig > 0.05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi heterokestisitas. berikut adalah tabel Uji Glejser:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas (glejser)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.002	.005		-.469	.686
	SILPA	.028	.031	.562	.892	.466
	Financial Distress	.007	.019	.231	.367	.749

a. Dependent Variable: abs

Sumber: data diolah di spss v27,2025

Berdasarkan tabel Uji glejser di atas dapat dilihat pada variabel SILPA (X1) dan variabel *Financial Distress* (X2) pada nilai Sig, maka dapat di ketahui nilai variabel SILPA (X1) sebesar Sig. 0.466 > 0.05 dan pada variabel *Financial Distress* (X2) sebesar Sig. 0.749 > 0.05. Ini berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan kata lain, varians residual relatif konstan di seluruh nilai prediktor, sehingga model regresi dapat dianggap stabil. maka dapat dinyatakan variabel SILPA (X1) dan variabel *Financial Distress* (X2) tidak terjadi heterokestisitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengUji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel bebas. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikoleniaritas pada model regresi dapat dilihat melalui nilai countered VIF (Variance inflasi faktor) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF > 10 atau tolerance < 0.10 maka terjadi multikoleniaritas . Sedangkan jika nilai VIF < 10 atau tolerance

> 0.10 maka tidak terjadi adanya multikoleniaritas. Hasil Uji multikoleniaritas dapat dilihat pada tabel 4.5 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SILPA	.898	1.113
	Financial Distress	.898	1.113

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual
Sumber: data diolah di spss v27,2025

Berdasarkan tabel Uji multikoleniaritas di atas, maka diketahui nilai tolerance variabel SILPA (X1) sebesar 0.898 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.113 < 10. nilai tolerance variabel *Financial Distress* (X2) sebesar 0.898> 0.10 dan nilai VIF 1.113 < 10. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang Signifikan dalam model. Ini menunjukkan bahwa variabel SILPA dan *Financial Distress* dapat dianggap independen satu sama lain, sehingga hubungan mereka terhadap Manipulasi Akrual dapat dianalisis dengan tepat. Maka variabel SILPA (X1) dan variabel *Financial Distress* (X2) tidak terjadi multikolinearitas.

D. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Untuk melihat besaran pengaruh variabel Manipulasi Akrual (y) terhadap variabel SILPA (x1) dan *Financial Distress* (x2) secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994[a]	.987	.974	.002973216

a. Predictors: (Constant), Financial Distress, SILPA
b. Dependent Variable: Manipulasi Akrual
Sumber: data diolah di spss v27,2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) Nilai R Square yang diperoleh adalah 0,987. Ini menunjukkan bahwa sekitar 98,7% variasi dalam variabel Manipulasi Akrual dapat dijelaskan oleh variabel SILPA dan Financial Distress. Angka ini mencerminkan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan dependen, mengindikasikan bahwa SILPA dan *Financial Distress* memiliki pengaruh Signifikan terhadap pengelolaan akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sisa 1,3% variasi lainnya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, yang dapat menjadi area untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,974 menunjukkan bahwa model ini masih memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan menambahkan variabel lain yang relevan.

b. Uji F

Dalam penelitian ini, Uji f digunakan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara Bersama- sma (simultan) terhadap variabel terikat. Diketahui F tabel sebesar 5.41. Nilai ini didapatkan dari rumus df1 = k-1 df2 = n-k-1. Uji f dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	2	.001	76.516	.013[b]
	Residual	.000	2	.000		
	Total	.001	4			

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

b. Predictors: (Constant), Financial Distress, SILPA

Sumber: data diolah di spss v27,2025

Berdasarkan pengambilan keputusan yaitu jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ (5.41) dan nilai Sig < 0.05, maka dapat dikatakan variabel independent berpengaruh dan singnifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil Uji F dari tabel di atas, diproleh nilai Fhitung sebesar 76.516, sedangkan hasil pada tabel distribusi dengan tingkat kesalahan 5% (0.05) adalah sebesar 5.41. hal ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel (76.516 > 5.41) dan nilai Signifikan (Sig.) sebesar 0.013 < 0.05, karena nilai Sig. lebih kecil dari 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap variabel terikat dalam laporan keuangan

c. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah besaran pengaruh dari setiap variabel independent secara individual (persial) terhadap variabel dependen. Di ketahui t-tabel sebesar 2.015. Nilai ini didapatkan dari rumus **df = n – k = 1.687**. Hasil Uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.012		-.415	.718
	SILPA	-.073	.071	-.087	-1.027	.412
	Financial Distress	.490	.043	.962	11.355	.008

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

Sumber: data diolah di spss v26,2024

Dari tabel di atas dasar pengambilan keputusan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.015) dan nilai Sig < 0.05 maka dapat dikatakan variabel independent berpengaruh dan singnifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, berikut ini dijelaskan pengaruh masing masing variabel independent secara persial.

1. SILPA (X1)

   Hasil pengUjian dengan spss untuk variabel SILPA (X1) terhadap Manipulasi Akrual (Y) di peroleh nilai t_{hitung} -1.027 < t_{tabel} 2.015 dan nilai Sig. 0.412 > 0.05. hal ini berarti variabel SILPA (X1) tidak mempunyai pengaruh negatif dan tidak Signifikan terhadap variabel Manipulasi Akrual (Y).

2. *Financial Distress* (X2)

   Hasil pengUjian dengan spss untuk variabel *Financial Distress* (X2) terhadap Manipulasi Akrual (Y) di peroleh nilai t_{hitung} 11.355 < t_{tabel} 2.015 dan nilai Sig. 0.008 > 0.05. hal ini berarti Variabel *Financial Distress* (X2) mempunyai pengaruh positif dan Signifikan terhadap variabel Manipulasi Akrual (Y).

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian mengenai "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan *Financial Distress* Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru". Penelitian ini mengambil sampel selama 5 (Lima) tahun, mulai 2019-2023 yang berasar dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Setelah melakukan penelitian dan pengujian, peneliti mendapatkan hasil pengujian sebagai berikut

1. Pengaruh SILPA terhadap Manipulasi Akrual

   Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. hasil temuan ini mengindikasikan bahwa SILPA tidak mempunyai pengaruh negatif dan tidak Signifikan terhadap Manipulasi Akrual, karna SILPA yang tinggi belum tentu terjadi Manipulasi Akrual dalam laporan leuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru.

   Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Alya Shafira dan Syukriy Abdullah (2022) yang menyatakan bahwa,"penyajian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bertujuan untuk penggunaan diskresi akrual yang lebih tinggi diduga karena kinerja keuangan yang buruk dapat disamarkan, ketidak cukupan dana dalam hal penyediaan pelayanan bagi publik (masyarakat), dan menghindari adanya biaya layanan atau defisit yang meningkat, serta dapat mencapai kemampuan maupun performa sesuai yang diproyeksikan berdasarkan konsep keuangannya". Dan penelitian ini mendukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh Adisti Dellia (2023) yang menunjukkan bahwa SILPA tidak memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual. artinya jika SILPA meningkat maka tidak selalu berimplikasi pada adanya Manipulasi Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun SILPA tinggi, tidak berarti ada upaya untuk menyembunyikan informasi keuangan yang buruk.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa SILPA yang tinggi tidak selalu berkaitan dengan Manipulasi Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, penelitian ini mengindikasikan bahwa Manipulasi Akrual lebih cenderung terjadi ketika pemerintah daerah berupaya menurunkan SILPA mendekati nol, yang dapat terjadi ketika pemerintah mengalami peningkatan pendapatan tetapi masih memiliki anggaran belanja yang belum terealisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor lain di luar SILPA mungkin lebih berperan dalam menentukan apakah Manipulasi Akrual terjadi atau tidak dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh *Financial Distress* terhadap Manipulasi Akrual

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap Manipulasi Akrual pada pelaporan keuangan pemerintah darah Kabupaten Barru. hasil temuan ini mengindikasikan bahwa dalam *Financial Distress* mempunyai pengaruh positif dan Signifikan terhadap Manipulasi Akrual.

Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh positif dan Signifikan terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Barru. Pemda yang

memiliki SILPA yang tinggi (Hemat) dan ketidak mampuan dalam memberikan pelayanan bagi publik (Masyrakat). Sehingga hal tersebut dapat dikatakan Pemda melakukan Manipulasi Akrual yaitu dengan menggunakan kebijakan (diskresi akrual) yang mana hal ini bertujuan dengan mengontrol pengeluaran yang mengakibatkan pada naik atau turunnya alokasi pelanja modal tahun berjalan pada laporan keuangan pemerintah daerah agar kondisi Pemda tidak kekurangan dana.

Hasil penelitian ini belum banyak menemukan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian lainnya dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian terbaru. tetapi terdapat beberapa penelitian yang hasilnya tetap mendukung temuan ini, bahwa *Financial Distress* berkontribusi terhadap tekanan keuangan yang dapat mendorong Manipulasi Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah,

Hasil penelitian yang mendukung yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Alya Shafira dan Syukriy Abdullah (2022) yang menemukan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh terhadap Manipulasi Akrual. Pemda yang memiliki kondisi ketidak cukupan dana dan fasilitas yang disediakan kurang serta ketidak mampuan dalam memberikan pelayanan bagi publik. Sehingga Pemda memiliki indikasi untuk melakukan Manipulasi Akrual. Dan di dukung oleh hasil penelitian Elfiyana, Fefri Indra Arza (2022) yang menemukan bahwa semakin mandiri keuangan suatu daerah, maka peluang terjadinya *Financial Distress* semakin tinggi. Tidak selamanya semakin tinggi PAD maka semakin tinggi total alokasi belanja modal dalam menghindari *Financial Distress.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan ini berujuan untuk mengetahui Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan *Financial Distress* Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Berdasarkan analisis data serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan SILPA tidak memilik i pengaruh negatif dan tidak Signifikan terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya SILPA tidak serta-merta menyebabkan terjadinya Manipulasi Akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil pengUjian hipotesis membuktikan bahwa *Financial Distress* terdapat pengaruh positif dan Signifikan terhadap Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengalami *Financial Distress* cenderung melakukan Manipulasi Akrual melalui kebijakan diskresi akrual. Manipulasi ini bertujuan untuk mengontrol pengeluaran guna menyesuaikan alokasi belanja modal pada tahun berjalan, sehingga kondisi keuangan pemerintah daerah tetap stabil dan tidak mengalami kekurangan dana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membarikan pengetahuan, saran maupun masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam mengelola keuangan daerah, khususnya terkait Manipulasi Akrual dalam laporan keuangan. supaya dapat lebih baik lagi dan disarankan pemerintah daerah lebih memperhatikan SILPA dan *Financial Distress* atau belanja modal untuk masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan tambahan kajian dan ilmu pengetahua mengenai masalah yang terkait dengan SILPA, *Financial Distress* dan Manipulasi Akrual pada laporan keuangan pemerintah daerah serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang dapat peneliti peroleh selama proses perkuliahan dan dapat memperdalam lebih dalam lagi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan kontribusi dikalangan akademik dalm melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis dan pengembangannya dimasa yang akan datang dan juga peneliti selanjutnya di harapkan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan penelitian ini supaya lebih memperkuat hasil penelian.

DAFTAR PUSTAKA

Arista, Salsabilla Putri, and Vanica Serly. 2023. Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Komite Audit Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Manajemen Laba Akrual. 5(3): 917–35.

Ayuni, Qurrotul, Yuliana Sari, and Yevi Dwitayanti. 2023. Analisa Pengaruh SILPA Dan Varians Anggaran Belanja Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9(5): 1869–77. doi:10.35870/jemsi.v9i5.1488.

Bisogno, M., & Donatella, P. 2021. Earnings Management in Public-Sector Organizations: A Structured Literature Review. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035/full/html.

Bougie, Sekaran. 2016. Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. *Leadership & Organization Development Journal* 34(7): 700–701. doi:10.1108/lodj-06-2013-0079.

Cohen, S., Bisogno, M. and Malkogianni, I. (2019). 2019. Earnings Management in Local Governments: The Role of Political Factors. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAAR-10-2018-0162/full/html.

Dandi, Dandi, and Achmad Suhaili. 2023. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Al-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 10(1): 104. doi:10.31602/al-kalam.v10i1.8331.

Dellia, Adisti. 2023. PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA), FINANCIAL DISTRESS, GOVERNMENT SIZE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAHRNDI INDONESIA. *Universitas Syiah Kuala*. https://etd.usk.ac.id/index.php?p=abstract&abstractID=118860.

Dewata, Evada, Yuliana Sari, Devi Febrianti, and Hadi Jauhari. 2023. Sosialisasi Upaya Pencegahan Financial Distress Pada Bpkad Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS* 1(6): 915–21. doi:10.59407/jpki2.v1i6.199.

Elfiyana, and Fefri Indra Arza. 2022. The Influence of Local Government Characteristics and Financial Factors on Financial Distress Conditions in Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4(2): 425–37.

Gamayuni, Rindu R. 2022. Motivation And Abnormal Accrual Characteristics On Financial Statements of Local Governments In Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt …* 19(2): 969–91. https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/11129%0Ahttps://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/download/11129/9982.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.

Gunadi, Egit. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa). : 1–15. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13058.

Handayani, Darwanis, and Syukriy Abdullah. 2022. Determinan Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 12(2): 275–91. doi:10.22219/jrak.v12i2.21502.

Haura, Ghina Adhha, Syukriy Abdullah, Rita Meutia, and Afrah Junita. 2024. Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Barang Dan Jasa Dan Efek Moderasi Financial Distress Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance* 4(2): 196. doi:10.24853/jago.4.2.196-218.

Illahi, Fitrah, Rice Haryati, and Dica Lady Silvera. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. *Pareso Jurnal* 3(3): 543–56.

Jones, Pendlebury. 2010. *Public Sector Ccounting*.

Kementerian Dalam Negeri. 2006. "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah No 13 Tahun 2006." *Peraturan.Bpk.Id* (1): 1–5.

Kromen, Maria Laetitia Boliina, Henny A Manafe, and M.E Perseveranda. 2023. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4(4): 460–68.

Nur Rafli, Muhammad, and Vita Fitria Sari. 2021. "Pengaruh PAD, SiLPA, Dan Fiscal Stress Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(3): 486–500.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 2018. Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research* (1): 4–7.

Putri, Mirdaniati, Syukriy Abdullah, Adnan Adnan, and Fifi Yusmita. 2023. "Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Apakah Government Size Dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek?" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 8(4): 536–44. doi:10.24815/jimeka.v8i4.24314.

Rahmawati, Rahmawati, and Anne Putri. 2023. Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal Dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*

3(2): 412–23. doi:10.47709/jebma.v3i2.2739.

Rani, Yulia. 2019. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Kinerja Keuangan Daerah (Studi Pada 38 Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah*: 1–13.

Safitri, Safira Solga, Kartika Aryanto, Andriana Andriana, and Arnis Budi Santoso. 2022. Analisis Penyebab Dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 9(2): 110. doi:10.19184/ejeba.v9i2.30420.

Shafira, Cut Alya, and Syukriy Abdullah. 2022. PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 7(3): 348–58. doi:10.24815/jimeka.v7i3.20574.

Soetiono, Bambang. 2023. Fraksi Golkar DPRD Barru Soroti Silpa Rp 113 M. https://kabargolkar.com/read/kabar_parlemen/33002/fraksi-golkar-dprd-barru-soroti-silpa-rp-113-m.

Sugiyono. 2017. Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung. *Bandung: Alfabeta*.

Tampubolon, Lisda, Evada Dewata, Desi Indriasari, and Hadi Jauhari. 2023. Pengaruh Government Size, Fiscal Distress, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Manipulasi Akrual. *Jurnal Akuntansi Bisnis* 21(2): 104–18. doi:10.24167/jab.v21i2.10910.

Wulandari, Silvia, and Eka Fauzihardani. 2022. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Rebudgeting Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4(1): 93–110. doi:10.24036/jea.v4i1.467.

Zakia, Rahima, and Mia Angelina Setiawan. 2021. Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3(3): 653–71. doi:10.24036/jea.v3i3.387.

L A M P I R A N

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 1 : Lampiran 1 Dokumentasi dokumen laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Barru tahun 2019-2023

1. Laporan realisasi anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

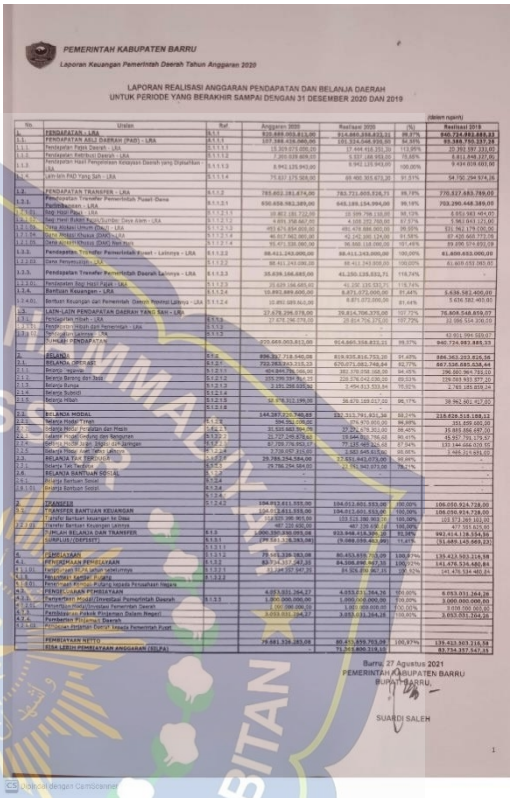

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

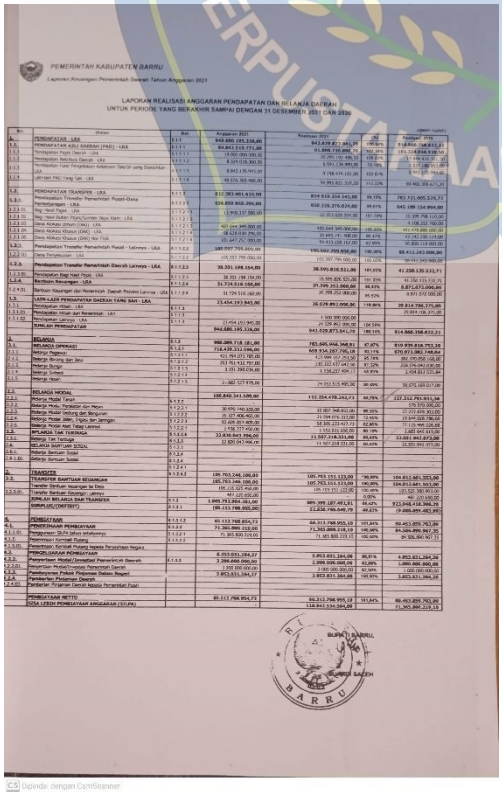

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Audited

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1		2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
1	4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 906.712.660.330,00	Rp 888.425.426.755,75	97,98	Rp 892.903.805.806,46
2	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 116.536.037.481,00	Rp 108.669.905.583,75	93,25	Rp 95.625.586.779,76
3	4.1.01	Pajak Daerah	Rp 24.678.108.406,00	Rp 25.785.922.730,01	104,49	Rp 24.325.109.079,54
4	4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 5.680.924.584,00	Rp 3.844.587.603,00	67,68	Rp 7.194.962.118,00
5	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.389.242.740,00	Rp 9.922.742.013,00	105,68	Rp 10.027.692.032,00
6	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 76.787.761.751,00	Rp 69.116.653.237,74	90,01	Rp 54.077.823.550,22
7		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 116.536.037.481,00	Rp 108.669.905.583,75	93,25	Rp 95.625.586.779,76
8	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 790.176.622.849,00	Rp 779.755.521.172,00	98,68	Rp 763.848.005.135,70
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 710.347.717.892,00	Rp 701.463.994.931,00	98,75	Rp 695.984.371.719,00
9	4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp 671.608.095.892,00	Rp 662.724.372.931,00	98,68	Rp 653.050.902.719,00
10	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 10.932.661.000,00	Rp 13.115.486.792,00	119,97	Rp 25.029.785.533,00
11	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 499.568.872.000,00	Rp 499.391.128.979,00	99,96	Rp 479.792.789.690,00
12	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 40.946.483.000,00	Rp 38.885.902.382,00	94,97	Rp 63.475.906.509,00
13	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 120.160.079.892,00	Rp 111.331.854.778,00	92,65	Rp 84.752.420.987,00
14		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	Rp 671.608.095.892,00	Rp 662.724.372.931,00	98,68	Rp 653.050.902.719,00
15	4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp -	Rp -		Rp 9.909.264.000,00
16	4.2.01.05	Dana Desa	Rp 38.739.622.000,00	Rp 38.739.622.000,00	100,00	Rp 42.933.469.000,00
17		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	Rp 38.739.622.000,00	Rp 38.739.622.000,00	100,00	Rp 52.842.733.000,00
18	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 79.828.904.957,00	Rp 78.291.526.241,00	98,07	Rp 57.954.369.416,70
19	4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 54.892.183.997,00	Rp 61.253.240.366,00	111,59	Rp 49.829.122.855,00
20	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp 24.936.720.960,00	Rp 17.038.285.875,00	68,33	Rp 8.125.246.561,70
21		JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Rp 79.828.904.957,00	Rp 78.291.526.241,00	98,07	Rp 57.954.369.416,70
22		TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	Rp 790.176.622.849,00	Rp 779.755.521.172,00	98,68	Rp 763.848.005.135,70
23	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -		Rp 33.430.213.891,00
24	4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	-	Rp 24.063.860.031,00
25	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp -	Rp -		Rp 9.366.353.860,00
26		JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -		Rp 33.430.213.891,00
27		JUMLAH PENDAPATAN	Rp 906.712.660.330,00	Rp 888.425.426.755,75	97,98	Rp 892.903.805.806,46
28	5	BELANJA DAERAH	Rp 1.007.608.922.840,00	Rp 906.753.762.122,58	89,99	Rp 893.989.958.349,00
29	5.1	BELANJA OPERASI	Rp 730.275.965.899,00	Rp 665.057.375.056,10	91,07	Rp 647.181.906.392,00
30	5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 414.788.769.125,00	Rp 380.173.392.967,00	91,77	Rp 383.900.225.528,00
31	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 285.048.305.234,00	Rp 258.845.601.745,10	90,81	Rp 250.638.718.839,00
32	5.1.03	Belanja Bunga	Rp 2.530.000.000,00	Rp 2.088.449.781,00	82,55	Rp 1.374.006.968,00
33	5.1.04	Belanja Subsidi	Rp 1.200.000.000,00	Rp 313.026.525,00		
34	5.1.05	Belanja Hibah	Rp 27.208.491.540,00	Rp 23.636.904.037,00	86,87	Rp 9.693.655.057,00
35	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp -		-	Rp 1.563.300.000,00
36		JUMLAH BELANJA OPERASI	Rp 730.275.965.899,00	Rp 665.057.375.056,10	91,07	Rp 647.181.906.392,00
37	5.2	BELANJA MODAL	Rp 181.612.170.854,00	Rp 148.016.364.234,00	433,98	Rp 145.657.719.665,00
38	5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp 7.301.200.000,00	Rp 7.100.823.600,00	99,99	Rp -
39	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 26.218.791.036,00	Rp 21.357.154.752,80	81,46	Rp 38.094.991.086,00
40	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 62.991.386.339,00	Rp 53.248.357.339,00	84,53	Rp 43.887.170.944,00
41	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 84.875.814.679,00	Rp 65.926.169.143,00	77,67	Rp 63.617.630.635,00
42	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 424.978.800,00	Rp 383.860.000,00	90,32	Rp 57.927.000,00
43		JUMLAH BELANJA MODAL	Rp 181.612.170.854,00	Rp 148.016.364.234,00	81,50	Rp 145.657.719.665,00
44	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 2.779.948.936,00	Rp 839.982.105,48	30,22	Rp 5.498.981.654,00
45	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp 2.779.948.936,00	Rp 839.982.105,48	30,22	Rp 5.498.981.654,00
46		JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	Rp 2.779.948.936,00	Rp 839.982.105,48	30,22	Rp 5.498.981.654,00
47	5.4	BELANJA TRANSFER	Rp 92.940.837.151,00	Rp 92.840.040.727,00	99,89	Rp 95.656.390.638,00
48	5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Rp 100.000.000,00	Rp -	-	Rp 133.000.000,00
49	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp 92.840.837.151,00	Rp 92.840.040.727,00	100,00	Rp 95.523.390.638,00
50		JUMLAH BELANJA TRANSFER	Rp 92.940.837.151,00	Rp 92.840.040.727,00	99,89	Rp 95.656.390.638,00
51		JUMLAH BELANJA	Rp 1.007.608.922.840,00	Rp 906.753.762.122,58	89,99	Rp 893.989.958.349,00
52		SURPLUS/DEFISIT	-Rp 100.896.262.510,00	-Rp 18.328.335.366,83	18,17	Rp 1.086.192.542,54
53	6	PEMBIAYAAN DAERAH				
54	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 103.949.293.775,00	Rp 113.804.956.323,65	109,48	Rp 118.954.641.046,89
55	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 103.949.293.775,00	Rp 113.804.956.323,65	109,48	Rp 118.954.641.046,89
56		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 103.949.293.775,00	Rp 113.804.956.323,65	109,48	Rp 118.954.641.046,89
57	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 3.053.031.265,00	Rp 3.053.031.264,52	100,00	Rp 4.053.031.264,00
58	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	-	Rp 1.000.000.000,00
59	6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	Rp 3.053.031.265,00	Rp 3.053.031.264,52	100,00	Rp 3.053.031.264,00
60		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 3.053.031.265,00	Rp 3.053.031.264,52	100,00	Rp 4.053.031.264,00
61		PEMBIAYAAN NETTO	Rp 100.896.262.510,00	Rp 110.751.925.059,13	109,77	Rp 114.901.609.782,89
62		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp -	Rp 92.423.589.692,30	-	Rp 113.815.417.240,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

1

CS Dipindai dengan CamScanner

2. Laporan perubahan anggaran lebih

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	83.734.357.547,35	141.476.534.480,84
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	84.506.890.967,35	141.476.534.480,84
3	Sub Total (1-2)		(772.533.420,00)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPSA)	5.2.3	71.365.800.219,10	83.734.357.547,35
5	Sub Total (3 + 4)		70.593.266.799,10	83.734.357.547,35
6	Lain-lain	5.2.4	772.533.420,00	
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	71.365.800.219,10	83.734.357.547,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Barru, 27 Agustus 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	71.365.800.219,10	83.734.357.547,35
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	71.365.800.219,10	84.506.890.967,35
3	Sub Total (1-2)		-	(772.533.420,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPSA)	5.2.3	118.943.534.504,89	71.365.800.219,10
5	Sub Total (3 + 4)		118.943.534.504,89	70.593.266.799,10
6	Lain-lain	5.2.4	-	772.533.420,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	118.943.534.504,89	71.365.800.219,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Audited

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	118.943.534.504,89	71.365.800.219,10
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	118.954.641.046,89	71.365.800.219,10
3	Sub Total (1-2)		(11.106.542,00)	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPSA)	5.2.3	113.815.417.240,35	118.943.534.504,89
5	Sub Total (3 + 4)		113.804.310.698,35	118.943.534.504,89
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	11.106.542,00	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	113.815.417.240,35	118.943.534.504,89

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	113.815.417.240,35	118.943.534.504,89
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	113.814.556.123,65	118.954.641.046,89
3	Sub Total (1-2)		**861.116,70**	**(11.106.542,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPSA)	5.2.3	92.433.189.492,30	113.815.417.240,35
5	**Sub Total (3 + 4)**		**92.434.050.609,00**	**113.804.310.698,35**
6	Lain-lain	5.2.4	(10.460.916,70)	11.106.542,00
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**5.2.5**	**92.423.589.692,30**	**113.815.417.240,35**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

3. Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2020	2019
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**		
3	**Kas Daerah**	**5.3.1.1**		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	67.721.007.784,10	80.370.714.635,35
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	315.092.750,00	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	100.000,00	17.115.500,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	1.951.970.542,00	633.625.208,00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	1.439.911.964,00	1.609.268.719,00
9	Kas Lainnya		696.524.759,00	1.87[illegible].432.995,00
10	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	682.274.744,00	1.278.112.496,00
11	Kas Lainnya Sertifikasi	5.3.1.1.7	4.250.015,00	4.250.015,00
12	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.2	-	-
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.2.1	5.970.342.939,93	5.326.9[illegible]2,93
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.2.2	(1.184.395.806,70)	(890.053.746,24)
15	Piutang Pajak Daerah (Netto)		4.785.947.133,23	4.436.866.016,69
16	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.2.3	6.951.753.353,00	5.967.286.373,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.2.4	(836.253.948,10)	(678.626.398,30)
18	Piutang Retribusi Daerah (Netto)		6.115.500.004,90	5.288.659.974,70
19	Piutang Transfer	5.3.1.2.5	10.588.463.300,00	10.433.316.892,33
20	Penyisihan Piutang Transfer	5.3.1.2.6	-	-
21	Piutang Dana Bagi Hasil (Netto)		10.588.463.300,00	10.433.316.892,33
22	**Beban Dibayar Dimuka**	**5.3.1.2.7**	164.676.224,96	147.050.423,83
23	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.2.8	277.113.678,00	313.202.178,00
24	Peny. Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.2.9	(41.567.051,70)	(31.680.217,80)
25	**Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)**		**235.546.626,30**	281.521.960,20
26	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**	**5.3.1.2.9**	973.615.400,00	974.865.400,00
27	Piutang Lainnya	5.3.1.2.10	5.088.356.024,00	19.161.443.464,00
28	Penyisihan Piutang Lainnya	**5.3.1.2.11**	(689.606.791,00)	(696.728.924,00)
29	**Piutang Lainnya (Netto)**		**4.398.749.233,00**	18.464.714.540,00
30	**Persediaan**	**5.3.1.2.12**	13.119.357.130,08	9.622.754.874,83
31	**JUMLAH ASET LANCAR**		**111.745.555.291,59**	**134.154.907.149,73**
32			-	
33	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.2**		
34	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		-	
35	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.1	3.955.716.170,95	3.955.716.170,95
36	**Investasi Non Permanen Lainnya**	**5.3.2.2**	3.955.716.170,95	3.955.716.170,95
37	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.3	(3.870.855.170,95)	(3.795.610.580,95)
38	Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)		84.861.000,00	160.105.590,00
39	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		**84.861.000,00**	**160.105.590,00**
40			-	
41	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**5.3.3**	**66.361.210.682,00**	**65.614.832.520,00**
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		66.361.210.682,00	65.614.832.520,00
43	Investasi Permanen Lainnya		-	-
44	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**		**66.361.210.682,00**	**65.614.832.520,00**
45	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		66.446.071.682,00	65.774.938.110,00
46			-	
47	**ASET TETAP**	**5.3.3.**		
48	Tanah	5.3.3.1	354.620.210.852,81	349.533.326.252,81
49	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	365.160.726.576,99	355.335.124.170,69
50	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	746.557.174.519,62	698.040.418.572,92
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	1.957.330.067.373,19	1.867.611.690.892,73
52	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	81.715.034.293,76	78.973.675.281,78
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	43.832.298.564,13	22.450.936.905,01
54	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.633.883.658.876,81)	(1.500.243.374.232,72)
55	**JUMLAH ASET TETAP**		**1.915.333.805.263,88**	**1.901.701.758.843,20**
56			-	
57	**DANA CADANGAN**	**5.3.4**		
58	Dana Cadangan			
59	**JUMLAH DANA CADANGAN**		-	
60			-	
61	**ASET LAINNYA**	**5.3.5**		
62	Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	**801.968.268,00**	**804.711.768,00**
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-

No.	Uraian	Ref.	2020	2019
64	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.2	1.005.170.**331,00**	826.301.331,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(127.948.**488,00**)	-
66	**Aset Tidak Berwujud NETTO**		877.221.**843,00**	**826.301.331,00**
67			-	
68	Aset Lain-lain	5.3.5.3	148.089.500.**451,30**	**208.846.840.471,30**
69	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.5.4		**(76.536.403.852,44)**
70	Aset Lain- (Netto)		148.089.500.**451,30**	**132.310.436.618,86**
71	**JUMLAH ASET LAINNYA**		149.768.687.**564,30**	**133.943.449.717,86**
72	**JUMLAH ARET**		2.243.284.219.**831,77**	**2.235.575.053.820,79**
73				
74	**KEWAJIBAN**	**5.3.6**		
75	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.6.1**		
76	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	5.3.6.1.1	-	-
77	Utang Bunga	5.3.6.1.2	2.169.086.**496,53**	2.454.813.533,84
78	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.6.1.3	3.053.031.**264,26**	3.053.031.264,26
79	Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang ditangguhkan	5.3.6.1.4	81.971.534,83	861.721.266,38
80	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6.1.5	14.488.644.**452,00**	18.658.827.182,53
81	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.6.1.6	8.251.182.**589,34**	17.682.847.232,74
82	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		28.012.818.**518,96**	**39.712.340.459,75**
83	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.6.2		
84	Utang Dalam Negeri	5.3.6.2.1	21.371.218.**849,92**	24.424.250.114,18
85	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
86	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		21.371.218.**849,92**	**24.424.250.114,18**
87	**JUMLAH KEWAJIBAN**		49.384.035.**368,88**	**64.136.590.573,93**
88			-	-
89	**EKUITAS**			
90	**EKUITAS**	5.3.7	2.193.900.184.**464,89**	**2.171.438.463.246,86**
			-	-
91	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		2.243.284.219.**831,77**	**2.235.575.053.820,79**

Barru, 27 Agustus 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2021	2020
1	**ASET**	5.3.1		
2	**ASET LANCAR**	5.3.1.1		
3	**Kas Daerah**	5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	109.562.758.302,89	67.221.962.284,10
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	166.892.353,00	23.526.730,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	17.463.750,00	1.000,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	8.315.895.790,00	1.993.870.542,00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	680.127.119,00	1.439.914.904,00
9	Kas Lainnya		200.816.094,00	686.524.759,00
10	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	196.566.079,00	682.274.744,00
11	Kas Lainnya Sertifikasi	5.3.1.1.7	4.250.015,00	4.250.015,00
12	**Investasi Jangka Pendek**	5.3.1.2	-	
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.2.1	6.559.925.066,93	5.970.342.939,93
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.2.2	(1.544.005.433,06)	(1.184.395.806,70)
15	Piutang Pajak Daerah (Netto)		5.015.919.633,87	4.785.947.133,23
16	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.2.3	7.120.641.243,00	6.951.753.353,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.2.4	(882.480.899,50)	(836.253.348,10)
18	Piutang Retribusi Daerah (Netto)		6.238.160.343,50	6.115.500.004,90
19	Piutang Transfer	5.3.1.2.5	17.713.761.372,00	10.588.463.320,00
20	Penyisihan Piutang Transfer	5.3.1.2.6	-	-
21	Piutang Dana Bagi Hasil (Netto)		17.713.761.372,00	10.588.463.320,00
22	**Beban Dibayar Dimuka**	5.3.1.2.7	**174.525.270,93**	**164.676.224,98**
23	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.2.8	277.113.678,00	277.113.678,00
24	Peny. Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.2.9	(55.422.735,60)	(41.567.051,70)
25	**Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)**		**221.690.942,40**	**235.546.626,30**
26	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**	5.3.1.2.9	959.315.400,00	973.615.400,00
27	Piutang Lainnya	5.3.1.2.10	5.178.792.218,15	5.086.356.024,00
28	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.2.11	(689.606.791,00)	(689.606.791,00)
29	**Piutang Lainnya (Netto)**		**4.489.185.427,15**	**4.396.749.233,00**
30	**Persediaan**	5.3.1.2.12	9.052.383.058,25	13.119.357.130,08
31	JUMLAH ASET LANCAR		162.808.894.856,99	111.745.655.291,59
32				
33	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.2		
34	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		-	
35	**Investasi Non Permanen Lainnya**	5.3.2.1	3.955.716.170,95	3.955.716.170,95
36	**Investasi Non Permanen Lainnya**	5.3.2.2	3.955.716.170,95	3.955.716.170,95
37	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.3	(3.899.142.170,95)	(3.870.855.170,95)
38	Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)		56.574.000,00	84.861.000,00
39	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		**56.574.000,00**	**84.861.000,00**
40				
41	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	5.3.3	**94.584.103.776,00**	**66.361.210.682,00**
42	**Penyertaan** Modal Pemerintah Daerah		94.584.103.776,00	66.361.210.682,00
43	**Investasi** Permanen Lainnya		-	-
44	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**		**94.584.103.776,00**	**66.361.210.682,00**
45	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**94.640.677.776,00**	**66.446.071.682,00**
46			-	
47	**ASET TETAP**	5.3.3		
48	Tanah	5.3.3.1	353.565.314.788,81	354.620.210.852,81
49	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	391.830.625.877,99	365.180.728.576,99
50	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	786.527.913.381,82	746.557.174.519,82
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	2.041.911.342.643,32	1.967.332.057.373,19
52	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	83.339.253.637,76	81.715.034.293,76
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	22.273.225.956,60	43.832.258.554,13
54	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.762.810.823.026,10)	(1.633.893.656.876,81)
55	**JUMLAH ASET TETAP**		**1.916.636.853.260,20**	**1.916.323.806.293,88**
56			-	
57	**DANA CADANGAN**	5.3.4		
58	Dana Cadangan			
59	JUMLAH DANA CADANGAN			
60			-	
61	**ASET LAINNYA**	5.3.5		
62	Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	801.965.268,00	801.965.268,00
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
64	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.2	1.204.170.331,00	1.005.170.331,00
65	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(397.019.518,00)	(127.948.486,00)
66	**Aset Tidak Berwujud NETTO**		**807.150.813,00**	**877.221.845,00**
67				
68	Aset Lain-lain	5.3.5.3	147.620.193.953,20	148.089.500.451,30
69	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.5.4	(61.620.333.832,29)	-

CS Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2021	2020
	Aset Lain- (Netto)		**85.999.860.120,91**	**148.089.500.451,30**
70	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**87.608.976.201,91**	**149.768.687.564,30**
71	**JUMLAH ASET**		**2.261.695.402.095,09**	**2.243.284.219.831,77**
72				
73	**KEWAJIBAN**	5.3.6		
74	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.6.1		
75	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1	418.904,00	-
76	Utang Bunga	5.3.6.1.2	175.037.133,07	2.168.086.406,52
77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.6.1.3	3.053.031.264,26	3.053.031.264,26
78	Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang ditangguhkan	5.3.6.1.4	63.518.102,30	81.971.534,83
79	Utang Beban	5.3.6.1.5	19.705.089.662,90	14.456.544.402,00
80	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
81	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.6.1.6	7.496.808.044,21	8.251.182.909,34
82	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**30.493.903.110,74**	**28.012.816.516,96**
83	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.6.2		
84	Utang Dalam Negeri	5.3.6.2.1	18.318.187.585,66	21.371.218.849,92
85	Utang Jangka Panjang Lainnya			
86	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		**18.318.187.585,66**	**21.371.218.849,92**
87	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**48.812.090.696,40**	**49.384.035.366,88**
88				
89	**EKUITAS**			
90	**EKUITAS**	5.3.7	2.212.883.311.398,69	2.193.900.184.464,89
91	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		2.261.695.402.095,09	2.243.284.219.831,77

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

CS Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Audited

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2022	2021
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1		
3	**Kas Daerah**	5.3.1.1	113.828.811.140,35	118.943.953.408,89
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	103.949.293.775,35	109.562.758.302,89
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	200.747,00	166.892.353,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	-	17.463.750,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	9.554.281.135,00	8.315.895.790,00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	95.501.446,00	680.127.119,00
9	**Kas Lainnya**		229.534.037,00	200.816.094,00
10	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	83.524.122,00	196.566.079,00
11	Kas Lainnya Sertifikasi	5.3.1.1.7	4.250.015,00	4.250.015,00
12	Kas Lainnya PAUD	5.3.1.1.8	9.600.000,00	
13	Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.9	132.159.900,00	
14	**Investasi Jangka Pendek**	5.3.1.2		-
15	**Piutang Pajak Daerah**	5.3.1.2.1	7.182.918.091,93	6.559.925.066,93
16	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.2.2	(1.983.714.185,92)	(1.544.005.433,06)
17	Piutang Pajak Daerah (Netto)	5.3.1.2.3	5.199.203.906,01	5.015.919.633,87
18	**Piutang Retribusi Daerah**	5.3.1.2.4	7.838.242.333,00	7.120.641.243,00
19	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.2.5	(1.982.643.476,80)	(882.480.899,50)
20	Piutang Retribusi Daerah (Netto)	5.3.1.2.6	5.855.598.856,20	6.238.160.343,50
21	**Piutang Transfer**	5.3.1.2.7	19.763.584.868,00	17.713.761.372,00
22	Penyisihan Piutang Transfer		-	-
23	Piutang Dana Bagi Hasil (Netto)		19.763.584.868,00	17.713.761.372,00
24	**Beban Dibayar Dimuka**	5.3.1.2.8	131.648.633,00	174.525.270,93
25	**Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**	5.3.1.2.9	226.268.275,00	277.113.678,00
26	Peny. Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.2.10	(67.880.482,50)	(55.422.735,60)
27	Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	5.3.1.2.11	158.387.792,50	221.690.942,40
28	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**	5.3.1.2.12	958.715.400,00	959.315.400,00
29	Piutang Lainnya	5.3.1.2.13	3.318.005.292,64	5.178.792.218,15
30	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.2.14	(689.606.791,00)	(689.606.791,00)
31	Piutang Lainnya (Netto)	5.3.1.2.15	2.628.398.501,64	4.489.185.427,15
32	**Persediaan**	5.3.1.2.16	8.444.672.222,54	9.052.383.058,25
33				
34	JUMLAH ASET LANCAR		156.969.021.320,24	162.808.894.856,99
35				
36	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2		
37	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**			-
38	**Investasi Non Permanen Lainnya**	5.3.2.1	3.955.716.170,95	3.955.716.170,95
39	Investasi Non Permanen Lainnya		3.956.716.170,95	3.955.716.170,95
40	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.2	(3.927.429.170,95)	(3.899.142.170,95)
41	Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)		28.287.000,00	56.574.000,00
42	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		28.287.000,00	56.574.000,00
43				
44	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	5.3.2.3	91.800.132.791,58	94.584.103.776,00
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		91.800.132.791,58	94.584.103.776,00
46	Investasi Permanen Lainnya		-	-
47	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**		91.800.132.791,58	94.584.103.776,00
48	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		91.828.419.791,58	94.640.677.776,00
49				-
50	ASET TETAP	5.3.3.		
51	Tanah	5.3.3.1	354.523.652.988,81	353.565.314.788,81
52	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	433.150.377.921,99	391.830.625.877,99
53	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	826.508.905.274,57	786.527.913.381,82
54	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	2.100.165.574.344,32	2.041.911.342.643,32
55	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	84.971.408.046,86	83.339.253.637,76
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	40.592.727.803,97	22.273.225.956,60
57	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	(1.885.501.879.917,20)	(1.762.810.823.026,10)
58	JUMLAH ASET TETAP		1.954.410.766.463,32	1.916.636.853.260,20
59				-
60	DANA CADANGAN	5.3.4		
61	Dana Cadangan			
62	JUMLAH DANA CADANGAN			
63				

4

CS Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2022	2021
64	**ASET LAINNYA**	5.3.5		
65	Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	801.965.268,00	801.965.268,00
66	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
67	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.2	2.083.640.331,00	1.204.170.331,00
68	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.5.3	(532.094.383,49)	(397.019.518,00)
69	**Aset Tidak Berwujud NETTO**		1.551.545.947,51	807.150.813,00
70				
71	Aset Lain-lain	5.3.5.4	146.823.189.758,10	147.620.193.953,20
72	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.5.5	(61.620.333.832,29)	(61.620.333.832,29)
73	**Aset Lain- Lain (Netto)**		85.202.855.925,81	85.999.860.120,91
74				
75	**Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**		2.182.825.792,00	-
76	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.5.6	2.182.825.792,00	-
77				
78	JUMLAH ASET LAINNYA		89.739.192.933,31	87.608.976.201,91
79	JUMLAH ASET		2.292.947.400.508,46	2.261.695.402.095,09
80				
81	KEWAJIBAN	5.3.6		
82	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.6.1		
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1	13.393.900,00	418.904,00
84	Utang Bunga	5.3.6.1.2	154.340.508,73	175.037.133,07
85	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.6.1.3	3.053.031.264,52	3.053.031.264,26
86	Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang ditangguhkan	5.3.6.1.4	1.204.532.013,66	63.518.102,30
87	Utang Beban	5.3.6.1.5	19.815.286.852,00	19.705.089.662,90
88	**Utang Jangka Pendek Lainnya**			-
89	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.6.1.6	11.082.785.808,97	7.496.808.044,21
90	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		35.323.370.347,88	30.493.903.110,74
91	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.6.2		
92	Utang Dalam Negeri	5.3.6.2.1	15.265.156.321,66	18.318.187.585,66
93	Utang Jangka Panjang Lainnya			
94	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		15.265.156.321,66	18.318.187.585,66
95	JUMLAH KEWAJIBAN		50.588.526.669,54	48.812.090.696,40
96				
97	EKUITAS			
98	EKUITAS	5.3.7	2.242.358.873.838,91	2.212.883.311.398,69
99				
100	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.292.947.400.508,46	2.261.695.402.095,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

4

CS Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023		2022	
1	**ASET**	**5.3.1**				
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1**				
3	**Kas Daerah**	**5.3.1.1**	Rp	**93.191.694.552,30**		**113.828.811.140,35**
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	Rp	81.146.569.014,40	Rp	103.949.293.775,35
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	Rp	13.540.100,00	Rp	200.747,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	Rp	881.000,00	Rp	-
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	Rp	11.183.590.406,90	Rp	9.554.261.135,00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	Rp	-	Rp	95.501.446,00
9	**Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)**		Rp	**847.114.031,00**		**229.534.037,00**
10	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.6	Rp	85.968.786,00	Rp	83.524.122,00
11	Kas Lainnya Sertifikasi	5.3.1.1.7	Rp	4.250.015,00	Rp	4.250.015,00
12	Kas Lainnya PAUD	5.3.1.1.8	Rp	2.595.230,00	Rp	9.600.000,00
13	Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.9	Rp	754.300.000,00	Rp	132.159.900,00
14	**Investasi Jangka Pendek**	**5.3.1.2**				
15	**Piutang Pajak Daerah**	**5.3.1.2.1**	Rp	**7.742.244.710,93**		**7.182.918.091,93**
16	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.2.2	-Rp	4.992.368.087,01	-Rp	1.983.714.185,92
17	Piutang Pajak Daerah (Netto)	5.3.1.2.3	Rp	2.749.876.623,92	Rp	5.199.203.906,01
18	**Piutang Retribusi Daerah**	**5.3.1.2.4**	Rp	**9.103.402.858,00**		**7.838.242.333,00**
19	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.2.5	-Rp	7.557.596.717,00	-Rp	1.982.643.476,80
20	Piutang Retribusi Daerah (Netto)	5.3.1.2.6	Rp	1.545.806.141,00	Rp	5.855.598.856,20
21	**Piutang Transfer**	5.3.1.2.7	Rp	14.257.681.920,00		19.763.584.868,00
22	Penyisihan Piutang Transfer		Rp	-		-
23	Piutang Dana Bagi Hasil (Netto)		Rp	14.257.681.920,00		19.763.584.868,00
24	**Beban Dibayar Dimuka**	5.3.1.2.8	Rp	127.055.290,00	Rp	131.648.633,00
25	**Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**	5.3.1.2.9	Rp	226.268.275,00	Rp	226.268.275,00
26	Peny. Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.2.10	-Rp	226.268.275,00	-Rp	67.880.482,50
27	Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	5.3.1.2.11	Rp	-		158.387.792,50
28	**Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi**	5.3.1.2.12	Rp	957.715.400,00	Rp	958.715.400,00
29	**Piutang Lainnya**	5.3.1.2.13	Rp	4.395.685.061,00	Rp	3.318.005.292,64
30	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.2.14	-Rp	706.643.821,00	-Rp	689.606.791,00
31	Piutang Lainnya (Netto)	5.3.1.2.15		3.689.041.240,00		2.628.398.501,64
32	**Persediaan**	5.3.1.2.16	Rp	12.759.792.840,43	Rp	8.444.672.222,54
33						
34	JUMLAH ASET LANCAR		Rp	129.278.664.007,65		156.969.021.320,24
35						
36	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.2				
37	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**					
38	**Investasi Non Permanen Lainnya**	5.3.2.1	Rp	**3.955.716.170,95**		**3.955.716.170,95**
39	Investasi Non Permanen Lainnya		Rp	3.955.716.170,95	Rp	3.955.716.170,95
40	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.2.2	-Rp	3.955.716.170,95	-Rp	3.927.429.170,95
41	Investasi Non Permanen Lainnya (Netto)		-Rp	0,00		28.287.000,00
42	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		-Rp	0,00		28.287.000,00
43						
44	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	5.3.2.3	Rp	**89.822.608.182,00**		**91.800.132.791,58**
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		Rp	89.822.608.182,00	Rp	91.800.132.791,58
46	Investasi Permanen Lainnya		Rp	-	Rp	-
47	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**		Rp	**89.822.608.182,00**		**91.800.132.791,58**
48	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		Rp	89.822.608.182,00		91.828.419.791,58
49						
50	**ASET TETAP**	5.3.3				
51	Tanah	5.3.3.1	Rp	369.510.766.544,81	Rp	354.523.652.988,81
52	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	Rp	455.161.318.705,19	Rp	433.150.377.921,99
53	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	Rp	627.916.510.036,47	Rp	826.508.905.274,57
54	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	Rp	2.193.559.235.591,34	Rp	2.100.165.574.344,32
55	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	Rp	87.912.056.985,86	Rp	84.971.408.046,86
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	Rp	44.236.031.835,06	Rp	40.592.727.803,97
57	Akumulasi Penyusutan	5.3.3.7	-Rp	2.072.776.849.796,18		(1.885.501.879.917,20)
58	**JUMLAH ASET TETAP**		Rp	**1.905.519.069.902,54**		**1.954.410.766.463,32**
59						
60	**DANA CADANGAN**	5.3.4				

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2023		2022	
61	Dana Cadangan					
62	**JUMLAH DANA CADANGAN**					
63						
64	**ASET LAINNYA**	**5.3.5**				
65	Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	Rp	801.965.268,00	Rp	801.965.268,00
66	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp	-		
67	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.2	Rp	2.083.640.331,00	Rp	2.083.640.331,00
68	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.5.3	-Rp	740.458.416,59	-Rp	532.094.383,49
69	**Aset Tidak Berwujud NETTO**		Rp	**1.343.181.914,41**		**1.551.545.947,51**
70						
71	Aset Lain-lain	5.3.5.4	Rp	149.557.837.561,80	Rp	146.823.189.758,10
72	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.5.5	-Rp	882.367.568,00		(61.620.333.832,29)
73	**Aset Lain- Lain (Netto)**		Rp	**148.675.469.993,80**		**85.202.855.925,81**
74						
75	**Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**		Rp	-		**2.182.825.792,00**
76	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.5.6	Rp	-	Rp	2.182.825.792,00
77						
78	**JUMLAH ASET LAINNYA**		Rp	**150.820.617.176,21**		**89.739.192.933,31**
79	**JUMLAH ASET**		Rp	**2.275.440.959.268,40**		**2.292.947.400.508,46**
80						
81	**KEWAJIBAN**	**5.3.6**				
82	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.6.1**				
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1	Rp	5.883.320,00	Rp	13.393.900,00
84	Utang Bunga	5.3.6.1.2	Rp	149.671.098,29	Rp	154.340.508,73
85	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.6.1.3	Rp	3.053.031.265,13	Rp	3.053.031.264,52
86	Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang ditangguhkan	5.3.6.1.4	Rp	183.283.783,14	Rp	1.204.532.013,66
87	Utang Beban	5.3.6.1.5	Rp	19.176.348.648,00	Rp	19.815.286.852,00
88	**Utang Jangka Pendek Lainnya**		Rp	-		
89	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.6.1.6	Rp	15.255.683.893,86	Rp	11.082.785.808,96
90	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			**37.823.902.008,43**		**35.323.370.347,88**
91	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	5.3.6.2				
92	Utang Dalam Negeri	5.3.6.2.1	Rp	12.212.125.056,53	Rp	15.265.156.321,66
93	Utang Jangka Panjang Lainnya					
94	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		Rp	12.212.125.056,53		**15.265.156.321,66**
95	**JUMLAH KEWAJIBAN**		Rp	50.036.027.064,96		**50.588.526.669,54**
96						
97	EKUITAS					
98	EKUITAS	5.3.7	Rp	2.225.404.932.203,44		**2.242.358.873.838,91**
99						
100	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp	2.275.440.959.268,40		**2.292.947.400.508,46**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

4

Dipindai dengan CamScanner

4. Laporan operasional

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 219

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref.	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	968.151.287.850,43	988.507.532.018,51	(20.356.244.168,08)	102,10
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.1	89.617.764.371,05	109.869.266.621,11	(20.251.502.250,06)	122,60
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1)	18.058.465.983,17	20.558.662.978,06	(2.500.196.994,89)	113,85
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2)	7.336.379.211,68	8.602.614.719,79	(1.266.235.508,11)	117,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3)	8.942.135.943,00	9.434.009.603,00	(491.873.660,00)	105,50
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4)	55.280.783.233,20	71.273.979.320,26	(15.993.196.087,06)	128,93
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	783.876.751.854,38	819.457.412.588,40	(35.580.660.734,02)	104,54
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.1	545.189.154.994,00	708.722.073.389,00	(63.532.918.395,00)	109,65
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2	88.411.243.030,00	61.600.653.000,00	26.810.590.000,00	69,68
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3	41.405.261.860,38	43.498.103.799,40	(2.092.821.939,02)	105,05
11	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4	8.871.072.000,00	5.636.582.400,00	3.234.489.600,00	63,54
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	94.656.771.625,00	59.180.852.810,00	35.475.918.815,00	62,52
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3	94.656.771.625,00	59.180.852.810,00	35.475.918.815,00	62,52
14	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	
15	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	
16	BEBAN	5.4.1.2	929.487.565.576,31	939.909.958.020,00	(10.422.392.443,69)	101,12
17	Beban Pegawai - LO	5.4.1.2.1)	382.370.058.168,00	396.800.055.457,00	(14.429.997.289,00)	103,77
18	Beban Persediaan	5.4.1.2.2)	43.838.206.190,39	41.640.561.665,54	2.197.646.524,85	94,99
19	Beban Jasa	5.4.1.2.2)	147.887.299.715,11	154.907.196.029,46	(7.019.896.314,35)	104,75
20	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.2)	3.443.081.923,54	3.677.495.922,33	(234.413.998,79)	106,81
21	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.2)	30.800.573.074,00	35.760.564.651,00	(4.959.991.577,00)	116,10
22	Beban Bunga	5.4.1.2.3)	2.168.086.406,52	2.454.813.533,84	(286.727.127,32)	113,22
23	Beban Subsidi	5.4.1.2.4)		0,00	-	
24	Beban Hibah	5.4.1.2.5)	53.555.409.654,00	39.141.670.051,20	14.413.739.602,80	73,09
25	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.6)	0,00	0,00	-	
26	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.7)	160.748.912.988,59	156.507.463.380,40	4.241.449.608,19	97,36
27	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.8)	537.100.436,16	787.276.307,23	(250.175.871,07)	146,58
28	Beban Lain-lain	5.4.1.2.9)	126.233.467,00	2.181.936.294,00	(2.055.702.827,00)	
29	Beban Transfer	5.4.1.2.10)	104.012.601.553,00	106.050.924.728,00	(2.038.323.175,00)	101,96
30	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.1.3	38.663.722.274,12	48.597.573.999,51	(9.933.851.725,39)	125,69
					-	
31	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.2	0,00	0,00	-	
32	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	-	
33	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1	146.435.750,00	5.063.977.123,00	(4.917.541.373,00)	3.458,16
34	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	-	
35	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	-	
36	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2	0,00	3.695.918.476,00	(3.695.918.476,00)	#DIV/0!
37	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.3	146.435.750,00	1.368.058.647,00	(1.221.622.897,00)	934,24
38	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.3	33.810.158.024,12	49.965.632.646,51	(11.155.474.622,39)	128,74
					-	
39	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1	0,00	0,00	-	
40	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	98.950.483.051,00	0,00	98.950.483.051,00	
41	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.5	(98.950.483.051,00)	0,00	(98.950.483.051,00)	
42	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	(60.140.325.026,88)	49.965.632.646,51	(110.105.957.673,39)	(83,08)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Barru, 27 Agustus 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	2021	2020	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	**PENDAPATAN - LO**	**5.4.1.1**	**970.083.440.732,23**	**968.151.287.850,43**	**1.932.152.881,80**	**99,80**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**5.4.1.1.1**	**90.129.306.806,23**	**89.617.764.371,05**	**511.542.435,18**	**99,43**
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1)	20.694.301.057,49	18.058.465.983,17	2.635.835.074,32	86,43
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2)	6.763.453.868,54	7.336.379.211,68	(572.925.343,14)	108,47
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3)	9.198.474.101,00	8.942.135.943,00	256.338.158,00	97,21
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4)	53.273.077.779,20	55.280.783.233,20	(2.007.705.454,00)	103,77
7	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**5.4.1.1.2**	**832.044.552.197,00**	**783.876.751.854,38**	**48.167.800.342,62**	**94,21**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.1	755.924.175.624,00	545.189.154.994,00	110.735.020.630,00	85,36
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2	0,00	88.411.243.000,00	(88.411.243.000,00)	
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3	76.120.376.573,00	41.405.281.860,38	34.715.094.712,62	54,39
11	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4	0,00	8.871.072.000,00	(8.871.072.000,00)	
12	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**5.4.1.1.3**	**47.909.581.729,00**	**94.656.771.625,00**	**(46.747.189.896,30)**	**197,57**
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3	47.909.581.729,00	94.656.771.625,00	(46.747.189.896,00)	197,57
14	Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	
15	Pendapatan Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	
16	**BEBAN**	**5.4.1.2**	**910.447.012.726,56**	**929.487.565.576,31**	**-38.083.736.340,17**	**1,086,41**
17	Beban Pegawai - LO	5.4.1.2.1)	403.999.557.253,50	382.370.058.168,00	21.629.499.085,50	94,65
18	Beban Persediaan		68.556.646.987,48	43.838.206.190,39		
19	Beban Jasa		128.665.070.827,46	147.887.299.715,11		
20	Beban Pemeliharaan		9.862.931.089,50	3.443.081.923,54		
21	Beban Perjalanan Dinas		26.620.479.163,00	30.800.573.074,00		
22	Beban Bunga	5.4.1.2.3)	1.733.294.537,25	2.168.086.406,52	(434.791.869,27)	**125,08**
23	Beban Subsidi	5.4.1.2.4)	0,00		-	
24	Beban Hibah	5.4.1.2.5)	24.053.515.495,00	53.555.409.654,00	(29.501.894.159,00)	**222,65**
25	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.6)	0,00	0,00	-	
26	Beban Lain-lain	5.4.1.2.7)	526.125.100,00	126.233.467,00	399.891.633,00	**23,99**
27	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.7)	39.814.602.784,70	160.748.912.988,59	(120.934.310.203,89)	**403,74**
28	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.6)	15.929.648.720,00		15.929.648.720,00	**0,00**
29	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.7)	73.108.891.092,00		73.108.891.092,00	**0,00**
30	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.1.2.6)	0,00		-	
31	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.1.2.7)	0,00		-	
32	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.6)	117.100.366,00		117.100.366,00	**0,00**
33	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.7)	447.979.861,66	537.100.436,16	(89.120.574,50)	**119,89**
34	Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.7)	0,00		-	
35	Beban Bagi Bantuan Keuangan	5.4.1.2.8)	105.703.151.123,00	104.012.601.553,00	1.690.549.570,00	98,40
36	Beban Tak Terduga		11.507.218.331,00		11.507.218.331,00	**0,00**
37	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**		**59.636.428.006,67**	**38.663.722.274,12**	**40.016.889.221,97**	- **989**
38						
39	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
40	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	**5.4.2**	0,00	0,00	-	
41	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	-	
42	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1		146.435.750,00	(146.435.750,00)	
43	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	-	
44	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	-	
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2	-2.265.946.564,00	0,00	(2.265.946.564,00)	**0,00**
46	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.4.2.3	**-2.265.946.564,00**	**146.435.750,00**	(2.412.382.314,00)	-6,40
47						
48	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**5.4.3**	**-2.265.946.564,00**	**146.435.750,00**	**-2.412.382.314,00**	**-6,44**
49					-	
50	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1	0,00	0,00	-	
51	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	0,00	98.950.483.051,00	(98.950.483.051,00)	
52	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**	**5.4.5**	**0,00**	**-98.950.483.051,00**	**98.950.483.051,00**	
53	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.4.6**	**57.370.481.441,67**	[illegible]	**117.510.806.468,56**	**-104,83**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Audited

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	861.227.721.165,74	970.083.440.732,23	(108.855.719.566,49)	(11,22)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.1	95.732.618.132,04	90.129.306.806,23	5.603.311.325,81	6,22
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	24.968.968.952,22	20.894.301.057,49	4.074.687.894,73	19,50
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	6.768.126.198,96	6.763.453.868,54	4.672.330,42	0,07
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	10.027.692.032,00	9.198.474.101,00	829.217.931,00	9,01
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	53.967.810.948,86	53.273.077.779,20	694.733.169,66	1,30
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	725.147.185.423,70	832.044.552.197,00	(106.897.366.773,30)	(12,85)
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.1	655.233.728.511,00	650.326.376.624,00	4.907.351.887,00	0,75
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2	9.909.264.000,00	105.597.799.000,00	(95.688.535.000,00)	(90,62)
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3	51.878.946.351,00	45.721.124.573,00	6.157.821.778,00	13,47
11	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4	8.125.246.561,70	30.399.252.000,00	(22.274.005.438,30)	(73,27)
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	40.347.917.610,00	47.909.581.729,00	(7.561.664.119,00)	(15,78)
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.1	6.917.703.719,00	23.379.689.729,00	(16.461.986.010,00)	(70,41)
14	Dana Darurat - LO			-	-	-
15	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.1.3.2	33.430.213.891,00	24.529.892.000,00	8.900.321.891,00	36,28
16	BEBAN	5.4.1.2	1.105.470.273.864,35	910.447.012.726,56	195.023.261.137,79	21,42
17	Beban Pegawai - LO	5.4.1.2.1	383.900.225.528,00	403.999.557.253,50	(20.099.331.725,50)	(4,98)
18	Beban Persediaan	5.4.1.2.2	115.978.830.959,25	68.556.646.982,49	47.422.183.976,76	69,17
19	Beban Jasa	5.4.1.2.2	97.709.332.788,83	128.665.070.827,46	(30.955.738.038,63)	(24,06)
20	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.2	5.598.302.976,00	9.662.931.089,50	(4.064.628.113,50)	(42,05)
21	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.2	31.092.110.006,00	26.620.479.163,00	4.471.630.843,00	16,80
22	Beban Bunga	5.4.1.2.3	1.353.310.343,66	1.733.294.537,25	(379.984.193,59)	(21,92)
23	Beban Subsidi	5.4.1.2.4	-	-		-
24	Beban Hibah	5.4.1.2.5	9.699.655.057,00	24.053.515.495,00	(14.353.860.438,00)	(59,67)
25	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.6	1.569.300.000,00	-	1.569.300.000,00	-
26	Beban Lain-lain	5.4.1.2.9		526.125.100,00	(526.125.100,00)	(100,00)
27	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.7	22.102.015.826,00	39.814.602.784,70	(17.712.586.958,70)	(44,49)
28	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.7	308.480.420.026,12	15.929.648.720,00	292.550.771.306,12	######
29	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.7	68.049.176.118,00	73.109.691.092,00	(5.060.514.974,00)	(6,92)
30	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-	-	-
31	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
32	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.7	135.074.866,43	117.100.366,00	17.974.500,43	15,35
33	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.8	1.580.616.077,06	447.979.861,66	1.132.636.215,40	252,83
34	Beban Bagi Hasil		-	-	-	-
35	Beban Bagi Hasil Bantuan Keuangan	5.4.1.2.10	52.722.921.638,00	105.703.151.123,00	(52.980.229.485,00)	(50,12)
36	Beban Tak Terduga	5.4.1.2.11	5.498.981.654,00	11.507.218.331,00	(6.008.236.677,00)	(52,21)
37	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.1.3	(244.242.552.698,61)	59.636.428.005,67	(303.878.980.704,28)	(509,55)
38						
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2	-	-	-	-
40	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	-
41	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	-
42	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1	-	-	-	-
43	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-
44	Defisit Penurunan Nilai Investasi	5.4.2.2	2.313.215.572,42	-	2.313.215.572,42	-
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2	250.906.877,00	(2.265.946.564,00)	2.516.853.441,00	(111,07)
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.2	(2.564.122.449,42)	(2.265.946.564,00)	(298.175.885,42)	13,16
47						
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.3	(2.564.122.449,42)	(2.265.946.564,00)	(298.175.885,42)	13,16
49						
50	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1	-	-	-	
51	Beban Luar Biasa	5.4.4.2	-	-	-	
52	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6	-	-	-	
53	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	(246.806.675.148,03)	57.370.481.441,67	(304.177.156.589,70)	(530,20)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	861.204.729.297,12	861.227.721.165,74	(108.855.719.566,49)	(11,22)
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.1	112.168.094.798,27	95.732.618.132,04	5.603.311.325,81	6,22
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.1	26.314.986.714,49	24.968.988.952,22	1.345.997.762,27	5,44
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.2	5.947.040.730,04	6.768.126.198,96	(821.085.468,92)	(12,14)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.3	9.922.742.013,00	10.027.692.032,00	(104.950.019,00)	(1,14)
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.4	69.983.325.340,74	53.967.810.948,86	16.015.514.391,88	30,06
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	733.327.170.432,00	725.147.185.423,70	(106.897.366.773,30)	(12,85)
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.1	660.541.547.139,00	655.233.728.511,00	5.307.818.628,00	0,82
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.2	-	9.909.264.000,00	(9.909.264.000,00)	(9,38)
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.3	55.747.337.418,00	51.878.946.351,00	3.868.391.067,00	6,40
11	Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.1.2.4	17.038.285.875,00	8.125.246.561,70	8.913.039.313,30	29,32
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	15.709.464.166,85	40.347.917.610,00	(7.561.664.119,00)	(15,78)
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.1	15.709.464.166,85	6.917.703.719,00	8.791.760.447,85	37,60
14	Dana Darurat - LO				-	-
15	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.1.3.2		33.430.213.891,00	(33.430.213.891,00)	(136,28)
16	BEBAN	5.4.1.2	913.442.288.356,43	1.105.470.273.864,35	195.023.261.137,79	21,42
17	Beban Pegawai - LO	5.4.1.2.1	379.218.392.991,00	383.900.225.528,00	(4.681.832.537,00)	(1,16)
18	Beban Persediaan	5.4.1.2.2	131.687.492.156,36	115.978.830.959,25	15.708.661.197,11	22,91
19	Beban Jasa	5.4.1.2.2	84.841.866.994,00	97.709.332.788,83	(12.867.465.794,83)	(10,00)
20	Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.2	5.504.393.628,00	5.598.302.976,00	(93.909.348,00)	(0,97)
21	Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.2	34.063.010.977,00	31.092.110.006,00	2.970.900.971,00	11,16
22	Beban Bunga	5.4.1.2.3	2.083.780.371,56	1.353.310.343,66	730.470.027,90	42,14
23	Beban Subsidi	5.4.1.2.4	313.026.525,00	-	313.026.525,00	-
24	Beban Hibah	5.4.1.2.5	23.636.904.037,00	9.699.655.057,00	13.937.248.980,00	57,94
25	Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.6	-	1.569.300.000,00	(1.569.300.000,00)	-
26	Beban Lain-lain	5.4.1.2.9	28.287.000,64		28.287.000,64	5,38
27	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.1.2.7	38.148.155.972,67	22.102.015.826,00	16.046.140.146,67	40,30
28	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.1.2.7	17.996.999.558,07	308.480.420.026,12	(290.483.420.468,05)	(1.823,54)
29	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.1.2.7	132.012.181.916,24	68.049.176.118,00	63.963.005.798,24	87,49
30	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				-	-
31	Beban Penyusutan Aset Lainnya			-	-	-
32	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.1.2.7	208.364.033,10	135.074.866,43	73.289.166,67	62,59
33	Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.8	8.759.031.963,79	1.580.616.077,06	7.178.415.886,73	1.602,40
34	Beban Bagi Hasil			-	-	-
35	Beban Bagi Hasil Bantuan Keuangan	5.4.1.2.10	54.100.418.727,00	52.722.921.638,00	1.377.497.089,00	1,30
36	Beban Tak Terduga	5.4.1.2.11	839.952.105,00	5.498.981.654,00	(4.658.960.549,00)	(40,49)
37	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.1.3	52.237.659.559,31	(244.242.552.698,61)	(303.878.980.704,28)	(509,55)
38						
39	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2		-	-	-
40	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO			-	-	-
41	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			-	-	-
42	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1		-	-	-
43	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO			-	-	-
44	Defisit Penurunan Nilai Investasi	5.4.2.2	2.177.997.335,00	2.313.215.572,42	(135.218.237,42)	-
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.2		250.906.877,00	(250.906.877,00)	11,07
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.2	2.177.997.335,00	(2.564.122.449,42)	(298.175.885,42)	13,16
47						
48	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.3	2.177.997.335,00	(2.564.122.449,42)	(298.175.885,42)	13,16
49						
50	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1		-	-	-
51	Beban Luar Biasa	5.4.4.2		-	-	-
52	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.6		-	-	-
53	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.6	54.415.556.894,31	(246.806.675.148,03)	(304.177.156.589,70)	(530,20)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

5. Laporan arus kas

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2020	2019
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**			
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		17.444.416.351,30	20.392.597.333,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		5.537.188.953,00	8.811.848.327,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.942.135.943,00	9.434.009.603,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		69.400.305.673,20	65.248.930.903,26
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		10.599.798.110,00	8.053.963.404,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak		4.108.252.760,00	5.963.043.171,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		491.478.886.000,00	531.962.179.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Fisik		42.142.100.124,00	157.311.242.864,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Non Fisik		96.860.118.000,00	-
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		88.411.243.000,00	61.600.653.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		41.250.135.532,71	43.901.994.559,07
15	Penerimaan Transfer Lainnya		-	-
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		8.871.072.000,00	5.636.582.400,00
17	Penerimaan Hibah		29.814.706.375,00	22.407.918.371,00
18	Penerimaan Dana Darurat		-	-
19	Penerimaan Lainnya		-	-
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
21	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**914.860.358.822,21**	**940.724.992.885,33**
22			-	-
23	**Arus Keluar Kas**			
24	Pembayaran Pegawai			396.800.984.785,00
25	Pembayaran Barang		228.576.042.030,00	229.003.933.577,20
26	Pembayaran Bunga		2.454.813.533,84	2.769.185.859,24
27	Pembayaran Subsidi		-	-
28	Pembayaran Hibah		56.670.169.017,00	38.962.601.417,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		-	-
30	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		103.525.380.903,00	105.573.369.103,00
31	Pembayaran Tidak Terduga		22.551.942.073,00	-
32	Transfer Bagi Hasil -Bantuan Keuangan Lainnya		487.220.650,00	477.555.625,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
36	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**796.635.626.374,84**	**773.587.610.366,44**
37	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**118.224.732.447,37**	**167.137.372.518,89**
38				
39				
40	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**			
41	**Arus Masuk Kas**		-	-
42	Pencairan Dana Cadangan		-	-
43	Penjualan atas Tanah		-	-
44	Penjualan atas Peralatan dan mesin		-	-
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
48	Penjualan Aset Lainnya		-	-
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
51				
52	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
53				
54	**Arus Keluar Kas**			
55	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
56	Perolehan Tanah		576.970.000,00	351.859.800,00
57	Perolehan Peralatan dan mesin		27.272.678.303,00	35.885.886.697,00
58	Perolehan Gedung dan Bangunan		19.644.028.786,68	45.957.791.179,57
59	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		77.135.469.226,68	133.144.666.020,55
60	Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.683.645.615,00	3.486.314.691,00
61	Perolehan Aset Lainnya		-	-
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	3.000.000.000,00
63	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
64	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**128.312.791.931,36**	**221.826.518.188,12**
65	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi**		**(128.312.791.931,36)**	**(221.826.518.188,12)**
66			-	-

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2020	2019
67			-	-
68	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		-	-
69	**Arus Masuk Kas**		-	-
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
79	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		-	-
80	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
81			-	-
82	**Arus Keluar Kas**		-	-
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		3.053.031.264,26	3.053.031.264,26
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
92	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**3.053.031.264,26**	**3.053.031.264,26**
93	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan**		**(3.053.031.264,26)**	**(3.053.031.264,26)**
94			-	-
95	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**		-	-
96	**Arus Masuk Kas**		-	-
97	Iuran Wajib Pajak		17.526.108.295,00	19.655.972.843,00
98	Pajak Penghasilan		882.088.289,27	19.985.233.593,81
99	Asuransi Kesehatan		8.523.028.707,00	5.902.515.569,00
100	Tabungan Perumahan		277.005.000,00	376.970.000,00
101	Pajak Pertambahan Nilai		1.017.562.689,00	20.962.140.171,09
102	PFK Tahun Lalu		-	-
	Koreksi Silpa Dana BOS Tahun 2019		772.533.420,00	-
103	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**28.998.326.400,27**	**66.882.832.176,90**
104			-	-
105	**Arus Keluar Kas**		-	-
106	Iuran Wajib Pajak		17.526.108.295,00	19.655.972.843,00
107	Pajak Penghasilan		882.088.289,27	19.985.233.593,81
108	Asuransi Kesehatan		8.523.028.707,00	5.902.515.569,00
109	Tabungan Perumahan		277.005.000,00	376.970.000,00
110	Pajak Pertambahan Nilai		1.017.562.689,00	20.962.140.171,09
111	PFK Tahun Lalu		-	-
112	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**28.225.792.980,27**	**66.882.832.176,90**
113	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris**		**772.533.420,00**	-
114	**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**		**(12.368.557.328,25)**	**(57.742.176.933,49)**
115	**Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**		-	-
116	**Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**		-	-
117	**Saldo Awal Kas setelah Penyesuain**		**83.734.357.547,35**	**141.476.534.480,84**
118	**Saldo Akhir Kas setelah Penyesuain**		**71.365.800.219,10**	**83.734.357.547,35**
119			-	-
120			-	-
121			-	-
122	**Saldo Akhir Kas**		**71.365.800.219,10**	**83.734.357.547,35**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Barru, 27 Agustus 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2021	2020
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	5.5.1		
2	**Arus Masuk Kas**	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		20 295 192 486,50	17 444 416 351,30
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6 591 238 990,00	5 537 188 953,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9 198 474 101,00	8 9[illegible] 135 943,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		54 995 821 319,20	68 400 305 673,20
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		22 553 028 054,00	10 599 798 110,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak			4 108 252 760,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		482 644 349 000,00	491 476 886 000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Fisik		50 695 741 408,00	42 142 108 124,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Non Fisik		94 433 258 162,00	96 860 118 000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus			
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		105 597 799 000,00	88 411 243 000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		38 595 826 521,00	41 250 135 532,71
15	Penerimaan Transfer Lainnya			
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		30 399 252 000,00	8 471 072 000,00
17	Penerimaan Hibah		1 500 000 000,00	29 814 706 375,00
18	Penerimaan Dana Darurat			
19	Penerimaan Lainnya			
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		24 529 892 000,00	
21	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**942.029.873.041,70**	**914.860.358.822,21**
22				
23	**Arus Keluar Kas**	5.5.1.2		
24	Pembayaran Pegawai		403 999 557 253,50	382 370 058 168,00
25	Pembayaran Barang		230 322 937 642,50	228 576 042 030,00
26	Pembayaran Bunga		1 558 257 404,18	2 454 613 533,64
27	Pembayaran Subsidi			
28	Pembayaran Hibah		24 053 515 495,00	56 670 169 017,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial			
30	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		105 703 151 123,00	103 525 380 903,00
31	Pembayaran Tidak Terduga		11 507 218 331,00	22 551 942 073,00
32	Transfer Bagi Hasil -Bantuan Keuangan Lainnya		-	467 220 650,00
33	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota			
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa			
36	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**777.144.637.249,18**	**796.635.626.374,84**
37	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**164.885.235.792,52**	**118.224.732.447,37**
38				
39				
40	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	5.5.2		
41	**Arus Masuk Kas**	5.5.2.1		-
42	Pencairan Dana Cadangan			-
43	Penjualan atas Tanah			-
44	Penjualan atas Peralatan dan mesin			-
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan			-
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya			-
48	Penjualan Aset Lainnya			-
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			-
51				
52	**Jumlah Arus Masuk Kas**			
53				
54	**Arus Keluar Kas**	5.5.2.2		
55	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
56	Perolehan Tanah		-	[illegible]
57	Perolehan Peralatan dan mesin		26 807 348 852,00	[illegible]
58	Perolehan Gedung dan Bangunan		25 594 076 313,00	[illegible]
59	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		58 300 233 427,73	[illegible]
60	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1 552 811 650,00	[illegible]
61	Perolehan Aset Lainnya		-	-
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2 000 000 000,00	1 000 000 000,00
63	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
64	**Jumlah Arus Keluar Kas**		114.254.470.242,73	128.312.791.931,36

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2021	2020
66				
67				
68	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	5.5.3		
69	**Arus Masuk Kas**	5.5.3.1		
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
78	Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
79	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya			
80	**Jumlah Arus Masuk Kas**			
81				
82	**Arus Keluar Kas**	5.5.3.2		
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		3 053 031 264,00	3 053 031 264,26
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan			
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
92	**Jumlah Arus Keluar Kas**		3.053.031.264,00	3.053.031.264,26
93	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan**		(3.053.031.264,00)	(3.053.031.264,26)
94				
95	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	5.5.4		
96	**Arus Masuk Kas**	5.5.4.1		
97	Iuran Wajib Pajak		19 281 036 316,00	17 526 108 295,00
98	Pajak Penghasilan		30 870 565 616,00	882 088 289,27
99	Asuransi Kesehatan		8 434 082 028,00	8 523 028 707,00
100	Tabungan Perumahan			277 005 000,00
101	Pajak Pertambahan Nilai		910 940 778,00	1 017 562 689,00
102	PFK Tahun Lalu		990 000,00	
	Koreksi Silpa Dana BOS Tahun 2019			772 533 420,00
103	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**59.497.614.738,00**	**28.998.328.400,27**
104				
105	**Arus Keluar Kas**	5.5.4.2		
106	Iuran Wajib Pajak		19 281 036 316,00	17 526 108 295,00
107	Pajak Penghasilan		30 870 394 848,00	882 088 259,27
108	Asuransi Kesehatan		8 434 082 028,00	8 523 028 707,00
109	Tabungan Perumahan			277 005 000,00
110	Pajak Pertambahan Nilai		910 692 642,00	1 017 562 689,00
111	PFK Tahun Lalu		990 000,00	
112	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**59.497.195.834,00**	**28.225.792.980,27**
113	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris**		**418.904,00**	**772.533.420,00**
114	**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	5.5.5	47 578 153 189,79	**(12.368.557.328,25)**
115	**Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	5.5.6		
116	**Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	5.5.7		
117	**Saldo Awal Kas setelah Penyesuain**		71 365 800 219,10	**83.734.357.547,35**
118	**Saldo Akhir Kas setelah Penyesuain**		118 943 953 408,89	71 365 800 219,10
119				
120				
121				
122	**Saldo Akhir Kas**		**118.943.953.408,89**	**71.365.800.219,10**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Audited

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2022	2021
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	5.5.1		
2	**Arus Masuk Kas**	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		24.325.109.079,54	20.295.192.486,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah		7.194.962.118,00	6.591.238.990,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.027.892.032,00	9.198.474.101,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		54.077.823.550,22	54.995.821.319,20
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		-	22.553.028.054,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak		-	-
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		504.822.575.223,00	482.644.349.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Fisik		63.475.906.509,00	50.695.741.408,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Non Fisik		84.752.420.987,00	94.433.258.162,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		52.842.733.000,00	105.597.799.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		49.829.122.855,00	38.595.826.521,00
15	Penerimaan Transfer Lainnya		-	-
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		8.125.246.561,70	30.399.252.000,00
17	Penerimaan Hibah		-	1.500.000.000,00
18	Penerimaan Dana Darurat		-	-
19	Penerimaan Lainnya		-	-
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		33.430.213.891,00	24.529.892.000,00
21	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**892.903.805.806,46**	**942.029.873.041,70**
22				
23	**Arus Keluar Kas**	5.5.1.2		
24	Pembayaran Pegawai		383.500.225.528,00	403.999.557.253,50
25	Pembayaran Barang		250.638.718.839,00	230.322.937.642,50
26	Pembayaran Bunga		1.374.006.968,00	1.558.257.404,18
27	Pembayaran Subsidi		-	-
28	Pembayaran Hibah		9.699.655.057,00	24.053.515.495,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		1.569.300.000,00	-
30	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		95.656.390.638,00	105.703.151.123,00
31	Pembayaran Tidak Terduga		5.498.981.654,00	11.507.218.331,00
32	Transfer Bagi Hasil -Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
33	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
36	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**748.337.278.684,00**	**777.144.637.249,18**
37	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**144.566.527.122,46**	**164.885.235.792,52**
38				
39				
40	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	5.5.2		
41	**Arus Masuk Kas**	5.5.2.1		
42	Pencairan Dana Cadangan		-	-
43	Penjualan atas Tanah		-	-
44	Penjualan atas Peralatan dan mesin		-	-
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
48	Penjualan Aset Lainnya		-	-
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
51			-	-
52	**Jumlah Arus Masuk Kas**			
53				
54	**Arus Keluar Kas**	5.5.2.2	-	-
55	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
56	Perolehan Tanah		-	
57	Perolehan Peralatan dan mesin		38.094.991.086,00	26.807.348.852,00
58	Perolehan Gedung dan Bangunan		43.687.170.944,00	25.594.076.313,00
59	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		63.617.630.635,00	58.300.233.427,73
60	Perolehan Aset Tetap Lainnya		52.927.000,00	1.552.811.650,00
61	Perolehan Aset Lainnya			-
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
63	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	
64	**Jumlah Arus Keluar Kas**		146.652.719.665,00	114.254.470.242,73
65	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi**		(146.652.719.665,00)	(114.254.470.242,73)
66			-	-
67				
68	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	5.5.3	-	-
69	**Arus Masuk Kas**	5.5.3.1	-	-
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-

6

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2022	2021
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
79	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		-	-
80	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
81			-	-
82	**Arus Keluar Kas**	5.5.3.2		-
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		3.053.031.264,00	3.053.031.264,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		-	-
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		-	-
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
92	**Jumlah Arus Keluar Kas**		3.053.031.264,00	3.053.031.264,00
93	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan**		(3.053.031.264,00)	(3.053.031.264,00)
94				
95	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	5.5.4		
96	**Arus Masuk Kas**	5.5.4.1		
97	Iuran Wajib Pajak		17.043.156.844,00	19.281.036.316,00
98	Pajak Penghasilan		14.749.664.154,00	30.870.565.616,00
99	Asuransi Kesehatan		8.354.717.660,00	8.434.082.028,00
100	Tabungan Perumahan		297.000,00	-
101	Pajak Pertambahan Nilai		15.859.301.809,00	910.940.778,00
102	Jaminan Kecelakaan Kerja		418.788.578,00	-
103	Jaminan Kematian		1.256.372.542,00	-
104	PFK Tahun Lalu			990.000,00
105	Koreksi Silpa Dana BOS Tahun 2021		-	-
106	**Jumlah Arus Masuk Kas**		57.682.498.587,00	59.497.614.738,00
107				
108	**Arus Keluar Kas**	5.5.4.2		
109	Iuran Wajib Pajak		17.043.156.844,00	19.281.036.316,00
110	Pajak Penghasilan		14.741.622.104,00	30.870.394.848,00
111	Asuransi Kesehatan		8.354.717.660,00	8.434.082.028,00
112	Tabungan Perumahan		297.000,00	-
113	Pajak Pertambahan Nilai		15.854.149.959,00	910.692.642,00
114	Jaminan Kecelakaan Kerja		418.788.578,00	-
115	Jaminan Kematian		1.256.372.542,00	-
116	PFK Tahun Lalu		418.904,00	990.000,00
117	**Jumlah Arus Keluar Kas**		57.669.523.591,00	**59.497.195.834,00**
118	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris**		12.974.996,00	**418.904,00**
119	**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	5.5.5	(5.126.248.810,54)	**47.578.153.189,79**
120	**Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	5.5.6	-	-
121	**Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	5.5.7	-	-
122	**Saldo Awal Kas setelah Penyesuain**		118.955.059.950,89	71.365.800.219,10
123	**Saldo Akhir Kas setelah Penyesuain**		113.828.811.140,35	118.943.953.408,89
124			-	-
125			-	-
126			-	-
127	**Saldo Akhir Kas**		**113.828.811.140,35**	**118.943.953.408,89**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

7

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	5.6.1		
2	**Arus Masuk Kas**	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		Rp 25.785.922.730,01	Rp 24.325.109.079,54
4	Penerimaan Retribusi Daerah		Rp 3.844.587.603,00	Rp 7.194.962.118,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp 9.922.742.013,00	Rp 10.027.692.032,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 69.116.653.237,74	Rp 54.077.823.550,22
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		Rp 13.115.466.792,00	Rp 25.029.785.533,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak		Rp -	Rp -
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		Rp 499.391.128.979,00	Rp 479.792.789.696,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Fisik		Rp 38.885.902.382,00	Rp 63.475.906.509,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Non Fisik		Rp 111.331.854.778,00	Rp 84.752.420.987,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus			
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		Rp 38.739.622.000,00	Rp 52.842.733.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		Rp 61.253.240.366,00	Rp 49.829.122.855,00
15	Penerimaan Transfer Lainnya			
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		Rp 17.038.285.875,00	Rp 8.125.246.561,70
17	Penerimaan Hibah			
18	Penerimaan Dana Darurat			
19	Penerimaan Lainnya			
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		Rp -	Rp 33.430.213.891,00
21	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**Rp 888.425.426.755,75**	**Rp 892.903.805.806,46**
22				
23	**Arus Keluar Kas**	5.6.1.2		
24	Pembayaran Pegawai		Rp 380.173.332.967,00	Rp 383.900.225.528,00
25	Pembayaran Barang		Rp 258.845.601.745,10	Rp 250.638.718.839,00
26	Pembayaran Bunga		Rp 2.068.449.782,00	Rp 1.374.006.966,00
27	Pembayaran Subsidi		Rp 313.026.525,00	Rp -
28	Pembayaran Hibah		Rp 23.636.904.037,00	Rp 9.699.655.057,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		Rp -	Rp 1.569.300.000,00
30	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		Rp 92.840.040.727,00	Rp 95.656.390.838,00
31	Pembayaran Tidak Terduga		Rp 839.982.105,48	Rp 5.498.981.654,00
32	Transfer Bagi Hasil -Bantuan Keuangan Lainnya			
33	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota			
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota			
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa			
36	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**Rp 758.737.397.888,58**	**Rp 748.337.278.684,00**
37	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**Rp 129.688.028.867,17**	**Rp 144.566.527.122,46**
38				
39				
40	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	5.6.2		
41	**Arus Masuk Kas**	5.6.2.1		
42	Pencairan Dana Cadangan		Rp -	Rp -
43	Penjualan atas Tanah		Rp -	Rp -
44	Penjualan atas Peralatan dan mesin		Rp -	Rp -
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		Rp -	Rp -
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp -	Rp -
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		Rp -	Rp -
48	Penjualan Aset Lainnya		Rp -	Rp -
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp -	Rp -
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		Rp -	Rp -
51			Rp -	Rp -
52	**Jumlah Arus Masuk Kas**			
53				
54	**Arus Keluar Kas**	5.5.2.2	Rp -	Rp -
55	Pembentukan Dana Cadangan			
56	Perolehan Tanah		Rp 7.100.623.000,00	Rp
57	Perolehan Peralatan dan mesin		Rp 21.357.154.752,00	Rp 38.094.991.086,00
58	Perolehan Gedung dan Bangunan		Rp 53.248.357.339,00	Rp 43.867.170.944,00
59	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		Rp 65.926.169.143,00	Rp 63.017.630.635,00
60	Perolehan Aset Tetap Lainnya		Rp 383.860.000,00	Rp 52.927.000,00
61	Perolehan Aset Lainnya			
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		Rp -	Rp 1.000.000.000,00
63	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
64	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**Rp 148.016.364.234,00**	**Rp 146.652.719.665,00**
65	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi**		**-Rp 148.016.364.234,00**	**-Rp 146.652.719.665,00**
66			Rp -	Rp -
67				
68	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	5.5.3	Rp -	Rp -
69	**Arus Masuk Kas**	5.5.3.1	Rp -	Rp -

6

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		Rp -	Rp -
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		Rp -	Rp -
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		Rp -	Rp -
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		Rp -	Rp -
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		Rp -	Rp -
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		Rp -	Rp -
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		Rp -	Rp -
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		Rp -	Rp -
78	Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp -	Rp -
79	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		Rp -	Rp -
80	**Jumlah Arus Masuk Kas**		Rp -	Rp -
81			Rp -	Rp -
82	**Arus Keluar Kas**	5.5.3.2	Rp -	Rp -
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		Rp 3.053.031.264,52	Rp 3.053.031.264,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		Rp -	Rp -
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		Rp -	Rp -
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		Rp -	Rp -
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		Rp -	Rp -
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		Rp -	Rp -
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		Rp -	Rp -
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		Rp -	Rp -
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		Rp -	Rp -
92	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**Rp 3.053.031.264,52**	**Rp 3.053.031.264,00**
93	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan**		**-Rp 3.053.031.264,52**	**-Rp 3.053.031.264,00**
94				
95	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	5.5.4		
96	**Arus Masuk Kas**	5.5.4.1		
97	Iuran Wajib Pajak		Rp 16.646.285.260,00	Rp 17.043.156.844,00
98	Pajak Penghasilan		Rp 16.132.365.942,00	Rp 14.749.864.154,00
99	Asuransi Kesehatan		Rp 8.413.837.984,00	Rp 8.354.717.660,00
100	Tabungan Perumahan		Rp -	Rp 297.000,00
101	Pajak Pertambahan Nilai		Rp 15.764.218.746,00	Rp 15.859.301.809,00
102	Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 420.897.242,00	Rp 418.788.578,00
103	Jaminan Kematian		Rp 1.262.688.225,00	Rp 1.256.372.542,00
104	PFK Tahun Lalu			
105	Kas Lainnya Pada Dinas Pariwisata (Utang)			
106	Koreksi Silpa Dana Kas Pengeluaran Tahun 2023			
107	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**Rp 58.640.293.399,00**	**Rp 57.682.498.587,00**
108				
109	**Arus Keluar Kas**	5.5.4.2		
110	Iuran Wajib Pajak		Rp 16.644.344.098,00	Rp 17.043.156.844,00
111	Pajak Penghasilan		Rp 16.128.423.784,00	Rp 14.741.622.104,00
112	Asuransi Kesehatan		Rp 8.413.837.984,00	Rp 8.354.717.660,00
113	Tabungan Perumahan		Rp -	Rp 297.000,00
114	Pajak Pertambahan Nilai		Rp 15.764.218.746,00	Rp 15.854.149.559,00
115	Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 420.897.242,00	Rp 418.788.578,00
116	Jaminan Kematian		Rp 1.262.688.225,00	Rp 1.256.372.542,00
	Koreksi Silpa Dana Kas Pengeluaran dan JKN Tahun 2023		Rp 860.916,70	
117	PFK Tahun Lalu		Rp 13.393.900,00	Rp 418.904,00
118	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**Rp 58.648.664.895,70**	**Rp 57.669.523.591,00**
119	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris**		**-Rp 8.371.496,70**	**Rp 12.974.996,00**
120	**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	5.5.6	**-Rp 21.389.738.128,05**	**-Rp 5.126.248.810,54**
121	**Koreksi Silpa Tahun Lalu**	5.5.6	Rp -	Rp -
122	**Kas di Bendahara Penerimaan (g)**			
123	**Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK (h)**		Rp 752.621.540,00	
124	**Saldo Awal Kas setelah Penyesuain**		Rp 113.828.811.140,35	Rp 118.955.059.950,89
125	**Saldo Akhir Kas setelah Penyesuain**		Rp 93.191.694.552,30	Rp 113.828.811.140,35
126			Rp -	Rp -
127			Rp -	Rp -
128			Rp -	Rp -
129	**Saldo Akhir Kas**		**Rp 93.191.694.552,30**	**Rp 113.828.811.140,35**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

7

Dipindai dengan CamScanner

6. Laporan perubahan ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2020	2019
1	**Ekuitas Awal**	5.6.1	2.171.438.463.246,86	2.163.681.361.256,22
2	**Surplus/Defisit LO**	5.6.2	(60.140.325.026,88)	49.968.632.646,61
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	5.6.3	82.602.046.244,92	(42.208.520.655,87)
4	Koreksi Atas Utang Beban Barang Dan Jasa (Utang Beban STNK Yang tidak Diakui Utang Tahun Lalu)		(21.509.625,32)	(42.280.023,00)
5	Koreksi Atas Extracomptable Atas Perubahan Kebijakan Akuntansi		(24.240.660.399,70)	1.846.351.855,81
6	Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Rugi PDAM Tahun 2019		726.175.879,00	-
7	Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Aset Tetap dan Aset Lain-lain berdasarkan Hasil Inveratrisasi Aset Tahun sebelumnya		177.631.737,00	
8	Koreksi Nilai KDP Berdasarkan Realisasi Fisik		(27.555.233,00)	1.083.496,98
9	Koreksi Atas Penghapusan Aset Tetap			-
10	Kesalahan Penginputan Extracomptable			-
11	Koreksi Atsa Penghapusan Aset Lain-Lain			-
12	Koreksi Atas Utang Pihak Ketiga			190.046.005,46
13	Koreksi AtasAkumulasi Penyusutan Aset Lain- Lain		75.448.809.362,46	-
14	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan 9KIB B, KIB C dan KIB D)		27.064.146.481,48	123.839.966,06
15	Koreksi Atas Investasi Jangka Panjang (investasi PDAM)			1,00
16	Koreksi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			262.963.678,00
17	Koreksi Atas Beban Pegawai (Selsih Gaji Tahun 2018 Dibayar Tahun 2019)			(909.328,00)
18	Koreksi Atas Saldo Awal Kas BOS		1.734.000	4,28
19	Koreksi Utang Beban Barjas			(117.568.986,00)
20	Koreksi Salah input Tagihan Uang Muka Barang dan Jasa			-
21	Koreksi Atas Belanja Modal Yang Tidak Di Akui Aset			(2.500.080,00)
22	Koreksi Beban Bunga			(62.566.787,37)
23	Koreksi Atas Aset Tetap		3.473.274.043	(0,45)
24	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			(44.418.980.464,24)
25	**JUMLAH EKUITAS AKHIR**	5.6.4	**2.193.900.184.464,89**	**2.171.438.463.246,86**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Barru, 27 Agustus 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

8

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

WORKSHEET LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	URAIAN	SALDO 31/12/2021 Audited	SALDO 31/12/2020 Audited
1	Ekuitas Awal	2.193.900.184.464,89	2.171.438.463.246,86
2	Surplus/Defisit LO	57.370.481.441,67	(60.140.325.026,88)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(38.387.354.507,87)	82.602.046.244,92
4	Koreksi Atas Aset Tetap		3.473.274.043,00
5	Kurang Catat Pada Beban LO (Dana Desa)	-	
6	Kurang Catat Pendapatan LO BLUD (Piutang Lainnya) Tahun 2021	-	
7	Salah Catat Atas Beban LO BLUD (Utang Jasa Layanan) Tahun 2021	-	
5	Koreksi Atas Utang Beban Barang Dan Jasa (Utang Beban STNK Yang tidak Diakui Utang Tahun Lalu)	(4.172.274,16)	(21.509.625,32)
6	Koreksi Atas Extracomptable atas Perubahan Kebijakan Akuntansi		(24.240.660.399,70)
7	Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Rugi PDAM Tahun 2019		726.175.879,00
8	Koreksi Nilai KDP Berdasarkan Realisasi Fisik		(27.555.233,00)
9	Koreksi Atas Saldo Awal Kas Bos		1.734.[illegible],00
10	Koreksi Atas Realisasi Pembayaran Utang Pihak Ketiga Barang dan Jasa yang tidak Di input	(574.581.340,84)	
11	Koreksi Kurang Catat Pada Persediaan (Beban LO) Tahun 2021	(213.461.269,47)	
12	Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Aset Tetap Pada Tahun Sebelumnya	446.715.000,00	
16	Koreksi Atas Penambahan Aset Tetap (Mutasi Antar SKPD)	12.532.751.191,73	
17	Koreksi Atas Pengurangan Aset Tetap (Mutasi Antar SKPD)	(12.532.751.191,73)	
13	Koreksi Atas Penghapusan Aset Lain-Lain	1.079.427.229,90	
14	Koreksi Atas Beban Penyusutan (KIB B, KIB C dan KIB D) Yang Belum Dicatat	1.231.889.269,42	27.064.146.481,48
15	Koreksi Atas Investasi Jangka Panjang (investasi BPD Sulselbar)	25.749.000.000,00	
16	Koreksi Mutasi Aset Penambahan Aset Tetap dan Inventarisasi	247.059.699,00	177.631.737,00
17	Koreksi Utang Dalam Negeri	(3.053.031.264,00)	
18	Koreksi Jurnal Penyertaan Modal	(2.000.000.000,00)	
19	Koreksi Beban Bunga	2.168.086.406,52	
25	Koreksi Atas Mutasi Masuk Aset Lain-lain	21.800.000,00	
26	Koreksi Atas Mutasi Keluar Aset Lain-Lain	(21.800.000,00)	
20	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(62.288.023.964,29)	75.448.809.362,46
21	Koreksi Atas Dobel Pencatatan Aset Tetap	(2.226.262.000,00)	
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	**2.212.483.311.398,69**	**2.193.900.184.464,89**

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

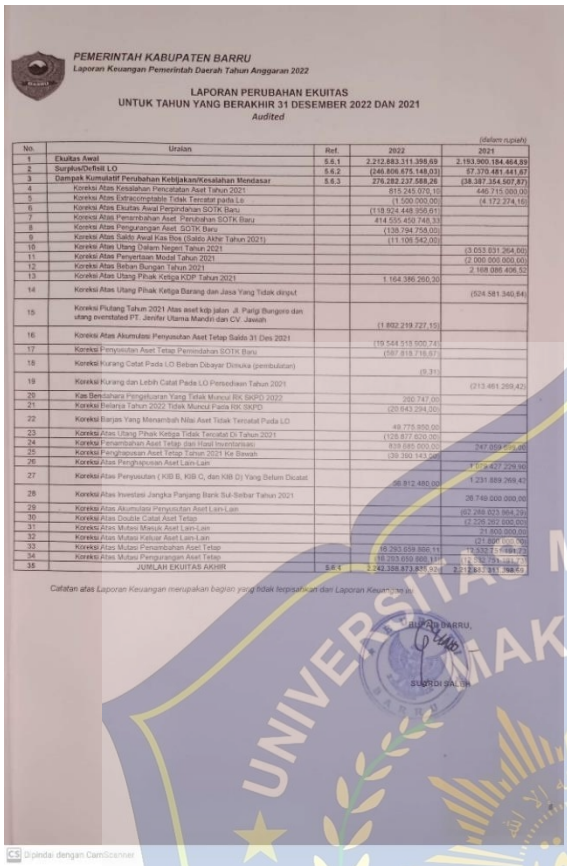

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Audited

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2022	2021
1	**Ekuitas Awal**	5.6.1	2.212.883.311.398,69	2.193.900.184.464,69
2	**Surplus/Defisit LO**	5.6.2	(246.806.675.148,03)	57.370.481.441,87
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	5.6.3	270.282.237.588,26	(38.387.354.507,87)
4	Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan Aset Tahun 2021		815.245.070,16	646.715.000,00
5	Koreksi Atas Extracomptable Tidak Tercatat pada Lo		(1.500.000,00)	(4.172.274,16)
6	Koreksi Atas Ekuitas Awal Perpindahan SOTK Baru		(118.924.448.956,61)	
7	Koreksi Atas Penambahan Aset Perubahan SOTK Baru		414.555.450.748,33	
8	Koreksi Atas Pengurangan Aset SOTK Baru		(138.794.758,00)	
9	Koreksi Atas Saldo Awal Kas Bos (Saldo Akhir Tahun 2021)		(11.106.542,00)	
10	Koreksi Atas Utang Dalam Negeri Tahun 2021			(3.053.031.264,00)
11	Koreksi Atas Penyertaan Modal Tahun 2021			(2.000.000.000,00)
12	Koreksi Atas Beban Bungan Tahun 2021			2.168.086.498,52
13	Koreksi Atas Utang Pihak Ketiga KDP Tahun 2021		1.164.386.260,30	
14	Koreksi Atas Utang Pihak Ketiga Barang dan Jasa Yang Tidak diinput			(524.581.340,64)
15	Koreksi Piutang Tahun 2021 Atas aset kdp jalan Jl. Parigi Bungore dan utang overstated PT. Jenifer Utama Mandiri dan CV. Jawah		(1.802.219.727,15)	
16	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo 31 Des 2021		(19.544.513.900,74)	
17	Koreksi Penyusutan Aset Tetap Pemindahan SOTK Baru		(587.918.718,67)	
18	Koreksi Kurang Catat Pada LO Beban Dibayar Dimuka (pembulatan)		(9,31)	
19	Koreksi Kurang dan Lebih Catat Pada LO Persediaan Tahun 2021			(213.461.269,42)
20	Koreksi Kas Bendahara Pengeluaran Yang Tidak Muncul RK SKPD 2022		200.747,00	
21	Koreksi Belanja Tahun 2022 Tidak Muncul Pada RK SKPD		(20.643.294,00)	
22	Koreksi Barjas Yang Menambah Nilai Aset Tidak Tercatat Pada LO		49.775.950,00	
23	Koreksi Atas Utang Pihak Ketiga Tidak Tercatat Di Tahun 2021		(128.877.626,00)	
24	Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Hasil Inventarisasi		839.685.000,00	247.059.[illegible]
25	Koreksi Penghapusan Aset Tetap Tahun 2021 Ke Bawah		(39.360.143,00)	
26	Koreksi Atas Penghapusan Aset Lain-Lain			110.427.229,90
27	Koreksi Atas Penyusutan (KIB B, KIB C, dan KIB D) Yang Belum Dicatat		36.912.480,00	1.231.889.269,42
28	Koreksi Atas Investasi Jangka Panjang Bank Sul-Selbar Tahun 2021			28.749.000.000,00
29	Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain			(62.286.023.984,29)
30	Koreksi Atas Double Catat Aset Tetap			(2.226.262.000,00)
31	Koreksi Atas Mutasi Masuk Aset Lain-Lain			21.602.000,00
32	Koreksi Atas Mutasi Keluar Aset Lain-Lain			(21.600.000,00)
33	Koreksi Atas Mutasi Penambahan Aset Tetap		18.293.059.886,11	12.532.1[illegible]
34	Koreksi Atas Mutasi Pengurangan Aset Tetap		(18.293.059.886,11)	(12.532.1[illegible]
35	JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.242.358.873.838,92	2.212.883.311.398,69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

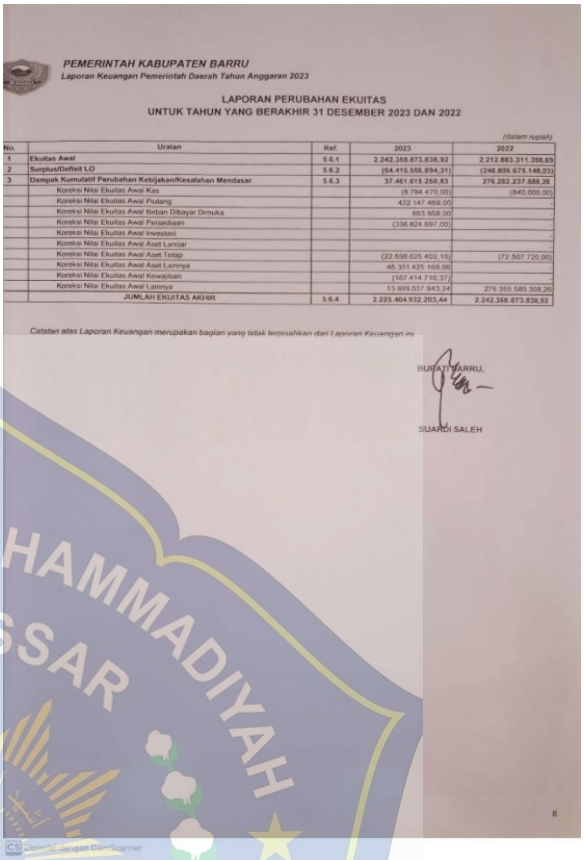

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
1	**Ekuitas Awal**	5.6.1	2.242.358.873.838,92	2.212.883.311.398,69
2	**Surplus/Defisit LO**	5.6.2	(54.415.556.894,31)	(246.806.675.148,03)
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	5.6.3	37.461.615.258,83	276.282.237.588,26
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas		(8.794.470,00)	(640.000,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang		432.147.469,00	-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka		663.958,00	-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan		(336.824.697,00)	-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi			-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lancar			-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap		(22.598.625.402,10)	(72.507.725,00)
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya		46.351.425.168,66	-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban		(167.414.710,37)	-
	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Lainnya		13.889.037.943,24	276.355.585.308,26
	JUMLAH EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.225.404.932.203,44	2.242.358.873.838,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2 : Tabulasi Data

Tahun	Variabel dependen	Variabel independen	
	Manipulasi Akrual (Y)	SILPA (X1)	*Financial Distress* (X2)
2019	0.098132516	0.089010454	0.220499197
2020	0.056948565	0.078007315	0.137792099
2021	0.050040235	0.126263018	0.126213833
2022	0.064399795	0.127466606	0.162924328
2023	0.064552883	0.10403078	0.163237662

Lampiran 3 : output hasil penggunakan spss

1. **Hasil Uji analisis deskriptif**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manipulasi Akrual	5	.050040	.098133	.06681480	.018509974
SILPA	5	.078007	.127467	.10495563	.022034430
Financial Distress	5	.126214	.220499	.16213342	.036370061
Valid N (listwise)	5				

2. **Analisis Regresi linier berganda**

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.012		-.415	.718
	SILPA	-.073	.071	-.087	-1.027	.412
	Financial Distress	.490	.043	.962	11.355	.008

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

3. **Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			5
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.00210238
Most Extreme Differences	Absolute		.172
	Positive		.129
	Negative		-.172
Test Statistic			.172
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.921
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.914
		Upper Bound	.927

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true Significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

4. Uji Heterokedastisitas

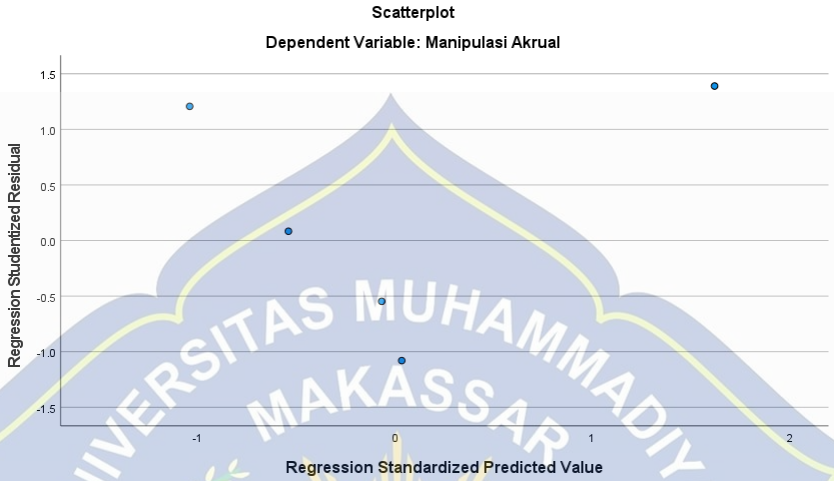

Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.002	.005		-.469	.686
	SILPA	.028	.031	.562	.892	.466
	Financial Distress	.007	.019	.231	.367	.749

a. Dependent Variable: abs

5. Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SILPA	.898	1.113
	Financial Distress	.898	1.113

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

6. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994[a]	.987	.974	.002973216

a. Predictors: (Constant), Financial Distress, SILPA

b. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

7. Uji F

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	2	.001	76.516	.013[b]
	Residual	.000	2	.000		
	Total	.001	4			

a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

b. Predictors: (Constant), Financial Distress, SILPA

8. Uji T

9. **Coefficients[a]**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.012		-.415	.718
	SILPA	-.073	.071	-.087	-1.027	.412
	Financial Distress	.490	.043	.962	11.355	.008

10. a. Dependent Variable: Manipulasi Akrual

Lampiran 4 : Nilai T tabel

dk	α untuk Uji Satu Pihak (*one tail test*)					
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
	α untuk Uji Dua Pihak (*two tail test*)					
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 5 : Validasi data dan Abstrak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8|e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUANTITATIF

NAMA MAHASISWA	MUH. AKBAR
NIM	105721100921
PROGRAM STUDI	MANAJEMEN
JUDUL SKRIPSI	PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
NAMA PEMBIMBING 1	Abdul Muttalib, S.E., M.M.
NAMA PEMBIMBING 2	Indriana, S.E., M.AK
NAMA VALIDATOR	ASRIANI HASAN,SE.,M.SC.

No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Instrumen Pengumpulan data (data primer)	21/02/25	Menggunakan Data sekunder	
2	Sumber data (data sekunder)	21/02/25	OK (menggunakan data keuangan)	
3	Raw data/Tabulasi data (data primer)	21/02/25	OK (File yang dikumpulkan berupa data Excel)	
4	Hasil Statistik deskriptif	21/02/25	Revisi tabel hasil analisis statistik deskriptif (angka dituliskan secara lengkap dan tidak copy paste secara langsung dari tabel SPSS)	
5	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	21/02/25	OK	
6	Hasil Uji Asumsi Statistik	21/02/25	Revisi tabel hasil uji normalitas,,hasil uji autokorelasi (angka dituliskan secara lengkap dan tidak copy paste langsung dari tabel SPSS)	
7	Hasil Analisis Data/Uji Hipotesis	21/02/25	Revisi Tabel hasil analisis regresi linier berganda, hasil uji kofisien determinasi, hasil uji F,hasil uji T (angka dituliskan secara lengkap dan tidak copy paste langsung dari tabel SPSS)	
8	Hasil interpretasi data	21/02/25	OK	
9	Dokumentasi	21/02/25	OK	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah dilaksana
**Catatan : Hasil Validasi ini diserahkan untuk mengikuti seminar hasil. Harap catatan revisi perbaikan wajib diverisi sebelum Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	**Muh. Akbar**
NIM	**105721100521**
PROGRAM STUDI	**Manajemen**
JUDUL SKRIPSI	**Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dan Financial Distress** Terhadap Manipulasi Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah **Daerah** Kabupaten Barru
NAMA PEMBIMBING 1	**Abdul Muttalib, S.E, MM**
NAMA PEMBIMBING 2	**Indriana, S.E, M.Ak**
NAMA VALIDATOR	**M. Hidayat, S.E, MM**

No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	27 Maret 2025	1. Penulisan* *terlampir pada catatan dapat dilihat dengan cara, *open word->review->show markup* *ACC dengan minor revision*	

**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5365/05/C.4-VIII/XI/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 November 2024 M
23 Jumadil awal 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 65/05/A.2-II/XI/46/2024 tanggal 23 Nopember 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH AKBAR**
No. Stambuk : **10572 1100521**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Manajemen**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Nopember 2024 s/d 29 Januari 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	:	**30049/S.01/PTSP/2024**	**Kepada Yth.**
Lampiran	:	-	Bupati Barru
Perihal	:	**Izin penelitian**	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5365/05/C.4-VIII/XI/1446/2024 tanggal 25 November 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**MUH. AKBAR**
Nomor Pokok	:	105721100521
Program Studi	:	Manajemen
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***29 November 2024 s/d 29 Januari 2025***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: 30049/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

NOMOR REGISTRASI 20241125729997

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru
https://dpmptsptk.barrukab.go.id : e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 3 Desember 2024

Nomor : 566/IP/DPMPTSP/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Nomor : 30049/S.01/PTSP/2024 tanggal, 25 November 2024 perihal tersebut di atas, maka ***Mahasiswa*** di bawah ini :

Nama : Muh. Akbar
Nomor Pokok : 105721100521
Program Studi : Manajemen
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Aroppoe Desa Tellumpanua Kec. Tanete Rilau Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **3 Desember 2024 s/d 3 Februari 2025**, dalam rangka penyusunan ***Skripsi***, dengan judul :

PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut degan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Ketua LP3M Unismuh Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan setifikat yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 322285 Kode Pos 90711

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000.9.6.3/61/BKAD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : **ABUBAKAR, S.Sos.,M.Si**
b. Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru.

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **MUH. AKBAR**
b. Nomor Pokok : 105721100521
c. Program Studi : Manajemen
d. Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
e. Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 30049/S.01/PTSP/2024 Tanggal 25 November 2024 Perihal Izin Penelitian, bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 November 2024 s/d 29 Januari 2025 dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul : "PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP MANIPULASI AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 Februari 2025
a.n. Kepala Badan
Sekretaris,

ANDI HARDIANZAH, SE.,M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19800303 200902 1 002

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 7 : Dokumentasi Ketika Melakukan Penelitian

1. Dokumentasi pengajukan surat izin meneliti

Pengajuan surat izin dengan pak Andi Hardianzah, S.E.,M.Si, (Kepala bidang Perencanaan Daerah Dan Sekretaris BKAD)

2. Dokumentasi pengambilan data keuangan

Pengambilan Dokumen Laporan Keuangan kepada Ibu Evi Trisnawat, S.E.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Akuntansi Pemerintah dan Penyaluran Kas)

Lampiran 8 Surat Plagiasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Akbar
Nim : 105721100521
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	2%	25 %
3	Bab 3	5%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 April 2025
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum, M.LP
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Bab I MUH. AKBAR
105721100521

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Apr-2025 07:30AM (UTC+0700)
Submission ID: 2643861694
File name: BAB_I_SKRIPSI_MUH._AKBAR.docx (47.53K)
Word count: 2045
Character count: 15703

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab I MUH. AKBAR 105721100521

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unika.ac.id Internet Source	8%

Exclude quotes
Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab II MUH. AKBAR
105721100521
by Tahap Tutup

Submission date: 14-Apr-2025 07:32AM (UTC+0700)
Submission ID: 2644863816
File name: BAB_II_SKRIPSI_MUH._AKBAR.docx (106.11K)
Word count: 3436
Character count: 28546

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab II MUH. AKBAR 105721100521

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

LULUS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab III MUH. AKBAR
105721100521

by Tahap Tutup

Submission date: 11-Apr-2025 07:32AM (UTC+0700)
Submission ID: 2644364745
File name: BAB_III_SKRIPSI_MUH._AKBAR.docx (46.43K)
Word count: 1813
Character count: 13886

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab III MUH. AKBAR 105721100521

ORIGINALITY REPORT

5%	0%	0%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	3%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%

Exclude quotes OFF Exclude matches

Exclude bibliography

LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab IV MUH. AKBAR
105721100521

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Apr-2025 07:34AM (UTC+0700)
Submission ID: 2644866143
File name: BAB_IV_SKRIPSI_MUH._AKBAR.docx (1.46 78K)
Word count: 3499
Character count: 26054

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab IV MUH. AKBAR 105721100521

ORIGINALITY REPORT

10%	2%	0%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	3%
2	Submitted to Saint Paul's High School Student Paper	1%
3	Submitted to RISEBA University of Applied Sciences Student Paper	1%
4	Submitted to Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1%
6	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Riau Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
9	mpra.ub.uni-muenchen.de Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab V MUH. AKBAR
105721100521

by Tahap Tutup

Submission date: 14-Apr-2025 07:34AM (UTC+0700)
Submission ID: 2644866659
File name: BAB_V_SKRIPSI_MUH._AKBAR.docx (34.09K)
Word count: 1115
Character count: 9306

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bab V MUH. AKBAR 105721100521

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unika.ac.id Internet Source	2%
2	helda.helsinki.fi Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

LULUS
Turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BIODATA PENULIS

Muh. Akbar panggilan Akbar Lahir di Barru pada tanggal 03 Januari 1999 dari pasangan suami istri Bapak Dahlan dan Ibu Saleha. Peneliti Ini anak terakhir dari (Lima) 5 Bersaudara yang Menjadi harapan dan kebanggan terakhir orang tua setelah Saudaranya. Peneliti Ini sekarang tinggal di Jalan Talasalapang No.3, Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah SDN No.1 Pekkae Lulus pada Tahun 2012, SMP Negeri 1 Tanete Rilau Lulus pada Tahun 2015, SMA Negeri 3 Barru Lulus pada Tahun 2018, dan mulai mengikuti Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai Dengan Penulisan Skripsi Ini, Peneliti Ini Masih Terdaftar Sebagai Mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN